

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

TAHUN 2019



KEMENTERIAN PERTANIAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hortikultura sampai dengan saat ini masih memiliki peran yang strategis di dalam pembangunan sektor pertanian seiring dengan semakin tingginya kesadaran konsumen akan pentingnya konsumsi komoditas hortikultura. Tidak hanya sebagai bahan pangan, komoditas hortikultura juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan. Hortikultura sampai Tahun 2019 tetap menjadi kontributor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura, terdapat lima sasaran strategis yaitu : 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura dengan indikator kinerja : a) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura sebesar 3,29%, b) Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura sebesar 10,65%; 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura dengan indikator kinerja a) produksi cabai sebesar 2.295.481 ton dan b) produksi bawang merah sebesar 1.495.993 ton; 3) Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura) sebesar 90%; 4) Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura dengan indikator kinerja Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura sebesar 5%; 5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura dengan indikator kinerja a) Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan target 83,00% b) Nilai Kinerja dengan target sebesar 74,00.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2019 melaksanakan satu program, yaitu Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. Program tersebut diimplementasikan dalam 6 (enam) kegiatan utama antara lain: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Kegiatan – kegiatan tersebut didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.040.063.787.000,00.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama, 5 (lima) indikator termasuk dalam capaian kategori sangat berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi (a) produksi cabai sebesar 2.588.633 ton dari target 2.295.481 ton (capaian realisasi sebesar 112,77%); (b) produksi bawang merah sebesar 1.580.243 ton dari target 1.495.993 (capaian realisasi sebesar 105,63%); (c) rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura) sebesar 100% dari target 90% (capaian realisasi sebesar 111,11%); (d) rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura sebesar 4,22% dari target luasan 5% (capaian realisasi sebesar 118,48%); (e) Nilai Kinerja yaitu 80,27 dari target 74 (capaian realisasi sebesar 108,47%). Satu indikator kinerja dengan capaian kategori berhasil yaitu penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura sebesar 8,72% dari target 10,65% (capaian realisasi sebesar 81,97%). Satu indikator kurang berhasil yaitu pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura, serta 1 (satu) indikator yang belum dapat dinilai yaitu nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Peningkatan volume ekspor tahun 2019 terjadi pada beberapa komoditas unggulan seperti nanas (3,37%), salak (37,60%), dan jahe (38,77%). Rata-rata pertumbuhan volume ekspor hortikultura sejak tahun 2015 – 2019 sebesar 2%. Upaya yang terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekspor produk hortikultura antara lain fasilitasi registrasi kebun/lahan usaha, sertifikasi GAP, desa pertanian organik dan registrasi *packing house*, fasilitasi pengembangan akses pemasaran/investasi produk hortikultura di pasar luar negeri dan melakukan promosi di dalam dan luar negeri, melakukan *Business*

matchmaking untuk mempertemukan eksportir dan pelaku usaha (kelompok tani), mengarahkan petani untuk menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan usaha yang berorientasi ekspor serta mendorong ekspor 3 (tiga) kali lipat untuk komoditas hortikultura potensi ekspor seperti kunyit, jahe, kapulaga, wortel, kubis, kentang, manggis, mangga, pisang, durian, nenas, salak, krisan dan dracaena.

Penurunan volume impor pada dua komoditas substitusi impor yaitu jeruk dan bawang putih adalah 19,56% untuk bawang putih, sedangkan untuk impor jeruk mengalami peningkatan sebesar 57,61%. Penurunan impor untuk 2 (dua) komoditas tersebut pada tahun 2019 adalah sebesar 8,73%. Upaya yang terus dilakukan untuk mendukung pencapaian target substitusi impor tersebut adalah peningkatan luas tanam, produksi dan produktivitas serta penerapan GAP, penyediaan sarana pertanian untuk mendukung produksi dan menyediakan teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim (kelebihan hujan dan kekeringan), pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyediaan benih bermutu, peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas bawang putih, menerapkan kebijakan wajib tanam dan produksi bawang putih bagi pemegang RIPH, dengan diiringi pengawasan pelaksanaan di lapangan dengan melibatkan dinas pertanian setempat, penggunaan *cold storage* untuk mempercepat masa dormansi benih bawang putih (teknologi vernalisasi) serta penggunaan *in-store dryer* untuk mempercepat pengeringan.

Pencapaian produksi komoditas hortikultura strategis cabai masuk kategori sangat berhasil karena mencapai target produksi yaitu sebesar 2.588.633 ton dengan rincian cabai rawit sebesar 1.374.215 ton dan cabai besar sebesar 1.214.418 ton. Sedangkan produksi komoditas bawang merah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 1.580.243 ton dari target produksi sebesar 1.495.993 ton. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja produksi cabai dan bawang merah antara lain melanjutkan pengembangan kawasan cabai dan bawang merah melalui dana APBN dengan pengaturan pola tanam berbasis kebutuhan riil, penguatan kawasan penyangga Jabodetabek dan pengembangan sentra baru di luar Jawa, inisiasi pembentukan korporasi, mendorong penggunaan benih bermutu, pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pencapaian sasaran program rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura) termasuk kategori sangat berhasil karena capaiannya sebesar 111,11 % dari target sebesar 90 %. Alsintan pascapanen di atas sudah diedarkan dan digunakan untuk keperluan pascapanen sebanyak 263 unit.

Pencapaian sasaran program rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura termasuk kategori sangat berhasil karena capaian rasio sebesar 4,22% dari target maksimal 5%. Keberhasilan pengamanan produksi hortikultura ini antara lain disebabkan peningkatan pengelolaan OPT hortikultura, koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaku perlindungan, dan peningkatan sosialisasi/ penyebarluasan informasi terkait pengelolaan OPT hortikultura.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 belum didapat karena evaluasi ini akan dilakukan sekitar bulan Maret – April 2020.

Capaian Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 mencapai 80,27 atau mencapai 108,47 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 74 atau dikategorikan sangat berhasil. Upaya yang akan dilakukan agar nilai kinerja lebih baik di tahun mendatang adalah melakukan pembinaan dan pendampingan untuk petugas pelaporan daerah dalam melakukan pengisian aplikasi SMART serta melakukan bimbingan teknis/pelatihan petugas pelaporan secara berkala, melakukan sosialisasi penilaian nilai kinerja kegiatan secara kontinu kepada satker – satker mandiri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar menjadi *early warning* dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga potensi masalah yang akan muncul dapat diatasi.

Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan laporan pemantauan keuangan online monitoring SPAN per tanggal 28 Januari 2020 adalah sebesar Rp944.676.148.736,- atau 90,83%. Rincian realisasi per kegiatan adalah: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 88,43%; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura sebesar 90,85%; 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura sebesar 96,36%; 4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar 94,15%; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar 93,79%; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 94,50%.

Adapun, penyebab tidak optimalnya pencapaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain adalah: (1) adanya *refocusing* anggaran pada bulan Februari 2019 untuk kawasan bawang merah dan realokasi kawasan sayuran lainnya (khusus kawasan bawang putih) pada Oktober 2019. Hal ini menyebabkan adanya perubahan penerima manfaat serta pergeseran jadwal tanam pelaksanaan kegiatan di lapangan akibat penyesuaian volume output bawang putih, (2) untuk kawasan sayuran lainnya (khusus kawasan bawang putih), pelaksanaannya menunggu ketersediaan benih yaitu pada triwulan III dan IV. Dimana terkendala dengan harga benih yang lebih tinggi dari pada harga pagu, bantuan melewati waktu tanam petani sehingga dilakukan perubahan CPCL, serta adanya pelaksanaan tender ulang karena tidak memenuhi persyaratan, (3) satker – satker yang mendapat output kawasan sayuran lainnya (khusus kawasan bawang putih) menyampaikan ketidaksanggupan setelah dilakukan realokasi anggaran di bulan Oktober 2020. Hal ini berakibat tidak terserapnya anggaran kawasan bawang putih seluas 643 ha, (4) untuk kawasan buah menunggu adanya ketersediaan air. Musim hujan ada pada triwulan IV, sehingga pengadaan barang untuk kawasan buah mengikuti pola iklim ini, (5) output – output kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran pada *refocusing* di bulan Oktober 2020 baru dapat melaksanakan kegiatan di triwulan IV seperti output benih buah lainnya dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam, (6) satker – satker yang mendapat alokasi kegiatan yang mendukung Program SERASI seperti Provinsi Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan terhambat pelaksanaannya karena belum selesainya kawasan rawa. Oleh karena itu satker – satker tersebut mengalihkan penerima manfaat ke wilayah yang bukan rawa.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2019 antara lain sebagai berikut : (1) melakukan upaya percepatan pada satker di wilayah Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat, (2) melakukan kegiatan evaluasi pengembangan hortikultura dengan mengundang pelaksana kegiatan dan petugas monitoring dan evaluasi dari seluruh satker untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang terjadi di daerah, (3) rapat pimpinan lingkup eselon II dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Hortikultura secara berkala dilakukan untuk memantau progres kegiatan serta membahas permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan isu – isu strategis lainnya, (4) mengirim surat kepada seluruh satker agar segera melakukan percepatan anggaran dan memberikan arahan kepada KPA melakukan upaya percepatan realisasi dan memberikan peringatan kepada satker yang belum ada perubahan signifikan

akan dipertimbangkan untuk dilakukan realokasi anggaran ke satker lain, (5) menghimbau kepada seluruh pelaksana kegiatan agar dapat melakukan pendekatan dengan pihak ULP di masing – masing daerah dalam rangka mempercepat proses pengadaan, (6) melakukan koordinasi, monitoring dan pengawalan pelaksanaan kegiatan ke satker – satker yang realisasi anggaran dan absensi pelaporan rendah dan (7) melakukan monitoring realisasi anggaran dan output kegiatan setiap hari dan diinformasikan kepada koordinator pelaporan disetiap direktorat teknis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut beberapa langkah tindak lanjut atas permasalahan penyerapan anggaran ini diantaranya: (1) mematuhi anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan target-target serapan triwulanan sehingga fokus kegiatan dapat lebih terarah utamanya dalam kaitannya dengan serapan dan realisasi kegiatan, (2) kegiatan – kegiatan yang tidak berhubungan dengan musim tanam dilaksanakan pada awal tahun, (3) pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga pada saatnya pengalih tugas tidak terhambat, (4) identifikasi CPCL dilakukan segera setelah DIPA terbit, (5) hasil pemantauan realisasi anggaran, capaian output serta progres pengadaan di daerah akan disampaikan ke semua eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura setiap bulan sebagai bahan informasi dan evaluasi kegiatan, sehingga permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera diselesaikan (6) evaluasi program/kegiatan pengembangan hortikultura akan dilakukan setiap triwulan dalam internal Direktorat Jenderal Hortikultura, dan (7) hasil pemantauan dan evaluasi satker akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam rapat pimpinan untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya.

Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan akan ditingkatkan, sementara hal – hal yang belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya – upaya perbaikan. Selain akan lebih menggerakkan seluruh pihak di dalam sub sektor hortikultura sendiri, Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura di Indonesia.

KATA PENGANTAR

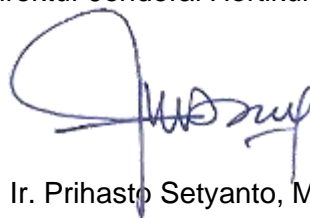
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan pembangunan hortikultura yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Capaian target pembangunan hortikultura Tahun 2019 terkait dengan program yang dilaksanakan pada tahun tersebut yaitu Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan. Atas keberhasilan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerjasama dengan baik, dan semoga ke depan pembangunan hortikultura akan semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian.

Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun 2019 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan untuk langkah – langkah perbaikan strategi pembangunan hortikultura di tahun – tahun yang akan datang.

Direktur Jenderal Hortikultura,



Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia	9
1.5 Dukungan Anggaran	9
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	22
2.3 Perjanjian Kinerja	24
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan	27
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2019	27
BAB IV. PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019	14
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019	23
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019	24
Tabel 4. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019	31
Tabel 5. Volume Ekspor Komoditas Hortikultura (ton) dan Pertumbuhan Ekspor (%) Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018	33
Tabel 6. Produksi Dalam Negeri Sembilan Komoditas yang Mendukung Ekspor	34
Tabel 7. Volume Impor Komoditas Hortikultura (ton) dan Penurunan Impor (%)	36
Tabel 8. Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen Hortikultura Tahun 2019	46
Tabel 9. Perkembangan Luas Serangan OPT dibandingkan Luas Tanam Hortikultura Tahun 2018 – 2019	50
Tabel 10. Data Luas Serangan OPT Hortikultura Tahun 2018 dan 2019 (Ha)	51
Tabel 11. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2019 berdasarkan Kewenangan Instansi	58
Tabel 12. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan Jenis Belanja TA 2019	58
Tabel 13. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2019 berdasarkan Kegiatan Utama	59
Tabel 14. Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 per Triwulanan	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Volume Ekspor Komoditas Hortikultura Tahun 2015 – 2019	34
Gambar 2. Registrasi Kebun Buah Naga dan Mangga	35
Gambar 3. Volume Impor Komoditas Jeruk dan Bawang Putih Tahun 2015 – 2019	37
Gambar 4. Produksi Jeruk (Ton) Tahun 2015 - 2019	38
Gambar 5. Produksi Bawang Putih (Ton) Tahun 2015 – 2019	39
Gambar 6. Pengembangan Kawasan Jeruk di Kabupaten Malang, Jawa Timur	41
Gambar 7. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2015 – 2019	41
Gambar 8. Kawasan Aneka Cabai Tahun 2019	43
Gambar 9. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2015 – 2019	44
Gambar 10. Hasil Panen dan Kawasan Aneka Bawang Merah Tahun 2019	45
Gambar 11. Bantuan Bangsal dan Alat Pascapanen Tahun 2019	49
Gambar 12. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 – 2018	54
Gambar 13. Capaian Nilai Kinerja Tahun 2019	56
Gambar 14. Proporsi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menurut Kegiatan Utama Tahun 2019	59
Gambar 15. Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 per-triwulanan	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura
- Lampiran 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
- Lampiran 3. Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 – 2019
- Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura 2019
- Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Revisi I)
- Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Revisi II)
- Lampiran 8. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hortikultura merupakan kelompok komoditas pertanian yang sangat beragam yang terdiri dari tanaman sayuran, buah, obat dan florikultura yang tersebar di berbagai sentra. Komoditas ini akan semakin berkembang seiring dengan dinamika dan kebutuhan pasar.

Komoditas hortikultura menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup diminati di pasar. Hal ini dipengaruhi oleh semakin tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang tidak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan.

Adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura telah memberikan payung hukum pada penyelenggaraan pembangunan hortikultura secara lebih komprehensif dan intensif. Dengan adanya peraturan legislasi ini diharapkan tujuan dari penyelenggaraan pembangunan hortikultura dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan baik dari sasaran produksi, produktivitas, mutu maupun kesinambungannya.

Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan hortikultura di Indonesia melalui Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura. Pelaksanaan Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan agroindustri yang menjadi bagian dari agenda NAWACITA, sejumlah komoditas hortikultura akan menjadi isu strategis komoditas pertanian yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pelaku usaha akibat kontribusinya terhadap perekonomian nasional antara lain : bawang merah, aneka cabai, jeruk, mangga, manggis, nenas, salak dan kentang.

Dengan demikian, dalam rangka melanjutkan program dan kebijakan yang sudah ada serta meningkatkan kinerja pembangunan hortikultura maka Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan penekanan yang signifikan pada peningkatan produksi melalui budidaya hortikultura dan peningkatan daya saing sebagai upaya mempersiapkan produk hortikultura Indonesia yang bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada: 1) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 2) Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2015, pasal 381 Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk dan tanaman hortikultura lainnya". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VII, Pasal 382 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budidaya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
7. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Menteri,

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, maka beberapa Eselon I mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian pada tugas dan

fungsi di masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Dengan demikian, sejak tahun 2016 susunan organisasi dan tata laksana unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura selanjutnya dijabarkan melalui unit – unit kerja Eselon II mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Sebagaimana diatur pada Permentan Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 383, susunan organisasi pada Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura;
3. Direktorat Buah dan Florikultura;
4. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;
5. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura;

- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura
2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain.
 3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura;
 4. Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.
5. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.
6. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura,

7. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
- f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Secara rinci struktur organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura dan sasaran kerja pegawai Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan pada Lampiran 1.

1.4. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura Tahun 2019 adalah sebanyak 351 orang, dengan golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 41 orang, golongan III sebanyak 253 orang dan golongan IV sebanyak 57 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sejumlah 180 orang dan perempuan sebanyak 171 orang. Sedangkan, rekapitulasi SDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu; Doktor (S3) sebanyak 7 orang, Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 95 orang, Sarjana (S1) sebanyak 161 orang, Diploma (D3) sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 70 orang, SLTP sebanyak 6 orang dan SD sebanyak 6 orang. Rincian komposisi pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Potensi SDM yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar secara merata pada masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai per unit Eselon II adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal sebanyak 115 orang, Direktorat Perbenihan sebanyak 44 orang, Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak 41 orang, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sebanyak 54 orang, Direktorat Perlindungan Hortikultura sebanyak 44 orang dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebanyak 52 orang.

1.5. Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2019, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah sebesar Rp1.040.378.419.000,00. Pada bulan Oktober 2019 anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menjadi Rp1.040.063.787.000,00. Perubahan anggaran ini untuk menutupi kekurangan

tunjangan kinerja Eselon 1 lain di Kementerian Pertanian. Sebagian besar anggaran yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan pada 86 satker.

Dari alokasi dana di Satker Pusat dan Daerah sebesar Rp1.040.063.787.000,00. digunakan untuk mendukung enam (6) kegiatan utama yaitu kegiatan: 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp577.688.932.000,00, 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura senilai Rp71.793.950.000,00, 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura senilai Rp115.388.251.000,00, 4) Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura senilai Rp46.406.163.000,00, 5) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai Rp148.799.270.000,00, serta 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp79.987.221.000,00.

Sedangkan untuk kegiatan di Pusat dari pagu senilai Rp150.699.897.000,00 dialokasikan pada masing-masing unit Eselon II sebagai berikut; Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp11.522.322.000,00, Direktorat Perbenihan Hortikultura senilai Rp14.083.850.000,00, Direktorat Perlindungan Hortikultura senilai Rp6.187.543.000,00, Sekretariat Direktorat Jenderal senilai Rp101.038.270.000,00, Direktorat Buah dan Florikultura senilai Rp9.002.791.000,00 dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp8.865.121.000,00.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen - komponen tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi: a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan c) Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura :

2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019. Dalam RPJPN yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015 – 2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sedangkan RPJMN 2015 – 2019 sebagai tahapan ketiga dari RPJPN 2005 – 2025 memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan.

Pada RPJMN 2015 – 2019, Nawa Cita menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan

diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik. Selain Kedaulatan Pangan yang ada dalam Nawa Cita, juga terdapat Peningkatan Agroindustri sebagai bagian dari agenda 6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kedaulatan Pangan dan Agroindustri menjadi bagian dalam upaya mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, yang digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat hingga 8,0 persen, tumbuhnya investasi 12,1 persen, serta ekspor yang diperkirakan tumbuh 12,2 persen di tahun 2019. Melalui upaya ketahanan pangan dan agroindustri, diharapkan sektor pertanian tumbuh 4,5 persen pertahun.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan revisi kedua untuk menjabarkan Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019 yang juga mengalami revisi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura menjabarkan adanya keterkaitan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian Pertanian adalah **Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi

Selaras dengan visi Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki visi **“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Hortikultura”** dengan misi yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Hortikultura adalah **“Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura”** dengan indikator tujuan sebagai berikut ;

TUJUAN	Indikator tujuan	Target 2019
Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura	PDB hortikultura per jumlah tenaga kerja hortikultura	Rp36 juta

Renstra Direktorat Hortikultura merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hortikultura secara berjenjang memangku tanggung jawab pencapaian beberapa Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan. Hal ini secara skematis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS (Kode SS)	IKSS/IKSP	Satuan	Target 2019
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional (SS3)	1 Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian nasional	%	10,52
	a Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	%	3,29
	2 Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	%	6,61
	b Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	%	10,65
Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional (SS4)	3 Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	%	7,90
	a Produksi cabai	Ton	2.295.481
	b Produksi bawang merah	Ton	1.639.724
Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan (SS8)	4 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	%	68,40
	a Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan pascapanen hortikultura	%	90,00
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI serta penyakit pada hewan (SS9)	5 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	%	11,05
	a Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	%	5,00

2.1.3 Strategi

Strategi yang dikembangkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan hortikultura 2015 – 2019 diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain:
 - 1.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - 1.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - 1.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - 1.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
 - 1.5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih.
2. Peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura melalui :
 - 2.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
 - 2.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;

- 2.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura;
- 2.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura.
3. Peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat melalui :
 - 3.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - 3.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - 3.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - 3.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat;
 - 3.5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat.
4. Pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura
 - 4.1. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
 - 4.2. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

- 4.3. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - 4.4. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - 4.5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - 4.6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam.
5. Peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura
 - 5.1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
 - 5.2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
 - 5.3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
 - 5.4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standarisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;

- 5.5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura;
 - 5.6. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura.
6. Peningkatan kualitas aparatur dan akuntabilitas layanan kelembagaan dalam Pengembangan Hortikultura
 - 6.1. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura;
 - 6.2. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - 6.3. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
 - 6.4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura.

2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mencapai visi dan misi pembangunan hortikultura 2015 – 2019 fokus pada usaha pengembangan kawasan, pengembangan sistem perbenihan, pengembangan sistem pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk hortikultura, pengembangan sistem perlindungan, serta tata kelola manajemen. Adapun penjelasan mengenai arah kebijakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Kawasan Budidaya Hortikultura
 - a) Peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing produk hortikultura secara berkelanjutan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi serta registrasi kebun/lahan usaha.

- b) Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha menuju kemandirian usaha hortikultura.
 - c) Peningkatan ketersediaan produk melalui pengaturan pola produksi dan penanganan pasca panen.
- 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
- a) Penumbuhan dan pematapan industri perbenihan hortikultura.
 - b) Fasilitasi regulasi perbenihan secara kondusif untuk kemandirian benih dalam negeri.
 - c) Fasilitasi sarana prasarana perbenihan untuk menghasilkan benih bermutu.
 - d) Pemasyarakatan dan promosi penggunaan benih bermutu.
- 3) Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
- a) Perlindungan Tanaman Berbasis Sistem PHT.
 - b) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (BPTPH, Laboratorium PHP/Agens Hayati/Lab, Pestisida, Klinik PHT dan PPAH).
 - c) Peningkatan Pengendalian OPT Hortikultura Penanganan Dampak Perubahan Iklim.
- 4) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura
- a) Fasilitasi Gudang/Bangsas pascapanen
 - b) Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen
 - c) Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan
 - d) Jumlah *Cold Storage* Hortikultura
 - e) Fasilitasi Hortipark
 - f) Fasilitasi Pemasaran Hortikultura
 - g) Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

- 5) Tata Kelola Manajemen
 - a) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja
 - b) Peningkatan pengendalian internal
 - c) Peningkatan pengelolaan data dan informasi
 - d) Peningkatan pengelolaan aset
 - e) Peningkatan aspek kehumasan
 - f) Pengelolaan regulasi hortikultura
 - g) Pengelolaan sumber daya hortikultura

2.1.5 Program dan Kegiatan

Sesuai Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 – 2019 (Edisi Revisi) ditetapkan Program Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura,

Pencapaian Program tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
3. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
4. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura
5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

2.1.6 Langkah Operasional

Adapun langkah operasional yang akan dilakukan untuk mempertajam pencapaian strategi pembangunan hortikultura 2015 – 2019 dilakukan melalui **Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura** dan dapat diurai sebagai berikut:

a. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

- Pengembangan kawasan cabe dan bawang merah
- Pengembangan kawasan sayuran lainnya dan tanaman obat
- Pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan
- Perbaikan infrastruktur kebun atau lahan
- Penerapan GAP
- Registrasi Lahan Usaha
- Penerapan teknologi tepat guna (inovatif)
- Penyediaan teknologi cabai dan bawang merah

b. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

- Pengembangan kawasan jeruk, mangga, manggis dan pisang
- Pengembangan kawasan buah lainnya
- Pengembangan Kawasan buah di wilayah perbatasan
- Pengembangan kawasan florikultura
- Perbaikan infrastruktur kebun atau lahan
- Penerapan GAP
- Registrasi kebun
- Registrasi Lahan Usaha
- Penerapan teknologi tepat guna (inovatif)
- Penyediaan teknologi budidaya buah dan florikultura

c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

- Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah
- Fasilitasi sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya
- Fasilitasi petugas informasi pasar
- Fasilitasi pasar lelang dan pasar tani
- Penyediaan teknologi pasca panen cabai dan bawang merah
- Fasilitasi jaminan mutu produk hortikultura
- Fasilitasi Dokumen Sistem Jaminan Mutu

d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

- Penguatan kelembagaan perbenihan
- Penumbuhan industri benih
- Penyediaan benih sumber hortikultura
- Penyediaan benih sebar hortikultura bermutu
- Sertifikasi Benih
- Sarana dan Prasarana Perbenihan

e. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

- Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman cabai dan bawang merah
- Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman hortikultura lainnya
- Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman
- Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan
- Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sum infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif
- Rekomendasi penanganan dampak perubahan iklim
- Penyediaan teknologi pengendalian OPT hortikultura
- Desa organik berbasis tanaman hortikultura

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura telah sejalan dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan disesuaikan dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis 2015 – 2019 yang telah disepakati di tingkat Kementerian Pertanian. Di dalam RKT telah ditetapkan target *outcome* yang akan dijadikan ukuran tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pencapaiannya. Dokumen IKSP dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4.

Target kinerja yang ditetapkan pada RKT 2019 mengikuti target yang ada di Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura (Revisi II). Target kinerja pada RKT 2019 memiliki nilai yang berbeda dengan target kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada bulan Januari 2019 yaitu pada target produksi bawang merah, hal ini terjadi sebagai hasil analisis prediksi capaian produksi bawang merah sehingga target produksi bawang merah pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan target produksi bawang merah yang ada pada RKT 2019.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	3.29 %
	2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	10.65 %
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3. Produksi cabai	2.295.481 Ton
	4. Produksi Bawang Merah	1.639.724 Ton
3. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)	90 %
4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5 %
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83 Nilai
	8. Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)	74 Nilai

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura, 2019

2.3 Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 – 2019 (Revisi II). Standar kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja (PK) merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Jenderal Hortikultura dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada awalnya telah ditandatangani pada bulan Januari Tahun 2019 dan dalam perjalanan waktu Direktorat Jenderal Hortikultura melakukan revisi sebanyak dua kali yaitu pada bulan Agustus dan Oktober Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 dan edisi Revisi PK dapat dilihat pada Lampiran 5, 6, dan 7. Tidak ada perbedaan target output pada PK awal dan edisi Revisi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	3.29 %
	2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	10,65 %
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3. Produksi cabai	2.295.481 Ton
	4. Produksi Bawang Merah	1.495.993 Ton
3. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)	90.00 %
4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5.00 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83.00 Nilai
	8. Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)	74.00 Nilai

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2019

Pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura diukur melalui indikator kinerja: 1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura, dan 2) Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura. Sasaran strategis kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura diukur melalui indikator kinerja produksi cabai dan bawang merah. Sasaran strategis ketiga yaitu tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan diukur melalui rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura). Sasaran strategis keempat yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura diukur melalui rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura. Terakhir, sasaran strategis kelima yaitu terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura diukur melalui indikator kinerja: 1) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan 2) Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2019 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%), 2) berhasil (capaian 80 - 100%), 3) cukup berhasil (capaian 60 - 79%), dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2019, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 5 (lima) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2019 dan realisasi kinerja, membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2019 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya, mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan Tahun 2019.

Pengambilan data pada indikator kinerja sasaran program (IKSP) dilakukan berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Masukkan data volume ekspor untuk setiap komoditas pertanian hortikultura yang ditentukan (yaitu mangga, nenas, manggis, salak, pisang, krisan, kentang, jamur dan jahe) sebagai target komoditas ekspor hortikultura untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Sumber data adalah dari BPS
- b. Masukkan data seluruh komoditas ekspor pertanian hortikultura sesuai tertera pada langkah 1 untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1)
- c. Hitung pertumbuhan volume ekspor pertanian hortikultura untuk komoditas ekspor pertanian hortikultura berdasarkan rumus dibawah ini:

$$\left(\frac{\text{Volume ekspor pertanian hortikultura (t)} - \text{Volume ekspor pertanian hortikultura (t-1)}}{\text{Volume ekspor pertanian hortikultura (t-1)}} \right) \times 100\%$$

2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura dihitung dengan cara sebagai berikut :

- a. Memasukkan data volume impor untuk setiap komoditas pertanian hortikultura yang ditentukan (yaitu jeruk dan bawang putih) sebagai target komoditas substitusi impor hortikultura untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1). Sumber data adalah dari BPS
- b. Memasukkan data seluruh komoditas substitusi impor pertanian hortikultura sesuai tertera pada langkah 1 untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t - 1)
- c. Hitung penurunan volume impor produk pertanian hortikultura untuk setiap komoditas substitusi impor pertanian hortikultura berdasarkan rumus dibawah ini :

$$\left(\frac{\text{Volume impor pertanian hortikultura (t)} - \text{Volume impor pertanian hortikultura (t-1)}}{\text{Volume impor pertanian hortikultura (t-1)}} \right) \times 100\%$$

3. Produksi cabai dan bawang merah

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menaksir produksi hortikultura sebagai berikut:

a. Informasi dari Petani/Kelompok Tani

Petugas dapat menanyakan langsung kepada Petani/Kelompok Tani mengenai jumlah pohon yang ditanam dan telah berproduksi pada periode laporan.

b. Laporan Petani kepada Kepala Desa

Petani biasanya melaporkan kepada Ketua Kelompok/Kontak Tani lebih dahulu dan Ketua Kelompok/Kontak Tani ini melaporkan kepada Kepala Desa, tetapi ada juga petani yang langsung melaporkan kepada Kepala Desa tanpa melalui Ketua Kelompok/Kontak Tani.

c. Banyaknya Benih yang Digunakan

Dengan mendasarkan pada banyaknya benih yang digunakan, petugas akan bisa mengetahui jumlah tanaman yang akan dijadikan dasar dalam menaksir jumlah produksi.

d. *Eye Estimate* (Perkiraan Pengamatan Lapang) berdasarkan luas baku dan jarak tanam. Metode ini selain digunakan untuk penaksiran luas lahan selanjutnya juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menaksir produksi, dengan syarat bahwa yang melakukan taksiran adalah pegawai/petugas desa yang sudah berpengalaman.

e. Informasi Lain

Sumber informasi lain yang dapat digunakan adalah Pedagang Pengumpul yang biasanya melakukan penaksiran produksi pada tanaman yang akan dipanen atau dibeli, Asosiasi, Koperasi dan lain-lain.

4. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. melakukan analisis kebutuhan alsintan pasca panen, kebutuhan alsintan pascapanen diambil dari pengajuan awal Rencana Kerja Anggaran Kementerian – Lembaga (RKA-K/L).
- b. menghitung jumlah alsintan yang tersedia untuk pasca panen dengan cara menghitung alsintan pasca panen yang telah diberikan kepada petani.
- c. melakukan perbandingan antara kebutuhan dan pengadaan alsintan dengan rumus dibawah ini :

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Alsintan yang tersedia untuk pascapanen}}{\Sigma \text{ Kebutuhan Alsintan untuk pascapanen}} \right) \times 100\%$$

- d. Data yang digunakan dalam perhitungan ini bersumber dari Subdirektorat Pascapanen, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
5. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura penghitungannya dilakukan dengan cara :
- a. Hitung luas tanam seluruh komoditas tanaman hortikultura nasional, komoditas ekspor dan komoditas substitusi impor pada tahun berjalan
 - b. Hitung luas serangan OPT dan DPI pada tahun berjalan yang menyebabkan gagal panen pada tanaman hortikultura. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen No 6 tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian seperti banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Sumber data dari Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura, Subdirektorat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat, dan Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam – Direktorat Perlindungan Hortikultura.

- c. Hitung rasio luas serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam pada tanaman hortikultura dengan rumus dibawah ini :

$$\left(\frac{\Sigma \text{Luas serangan OPT dan DPI tanaman hortikultura tahun berjalan}}{\Sigma \text{Luas tanam tanaman hortikultura tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

6. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dilakukan dengan cara melihat hasil penilaian AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
7. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) dapat dilihat dari aplikasi SMART Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target*	Realisasi	%	Kategori
1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	3.29 %	-3,63*** %	-110,33	Kurang berhasil
	2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	10.65 %	8,73*** %	81,97	Berhasil
2. Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3. Produksi cabai	2.295.481 Ton	2.588.633 Ton**	112,77	Sangat berhasil
	4. Produksi Bawang Merah	1.495.993 Ton	1.580.243 Ton**	105,63	Sangat berhasil
3. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)	90,00 %	100 %	111,11	Sangat berhasil

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target*	Realisasi	%	Kategori
4. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5,00 %	4,22 %	118,48	Sangat berhasil
5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83,00	-	-	-
	8. Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)	74,00	80,27	108,47	Sangat berhasil

Sumber : Ditjen Hortikultura, 2020

Keterangan : *) Berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Hortikultura Tahun 2019

***) Berdasarkan Angka Tetap BPS Tahun 2019

***) Berdasarkan data BPS 2020 (Ekspor dan Impor sampai Desember 2019)

3.2.1 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019, dari 8 (delapan) indikator kinerja yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yaitu produksi cabai, produksi bawang merah, rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura), rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura serta nilai kinerja. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori berhasil yaitu penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura, 1 (satu) indikator kurang berhasil yaitu pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura serta 1 (satu) indikator yang belum dapat dinilai yaitu nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

3.2.1.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian Tanaman Hortikultura

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura dan (2) Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura.

Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura pada tahun 2019 untuk 9 (sembilan) komoditas hortikultura yaitu kentang, jamur, mangga, manggis, nanas, pisang, salak, jahe, dan krisan dapat dilihat pada Tabel 5. Volume ekspor yang dicapai Tahun 2019 lebih kecil dibandingkan volume ekspor pada Tahun 2018, sehingga target pertumbuhan tidak tercapai. Pertumbuhan ekspor positif dicapai pada komoditas nanas, salak dan jahe.

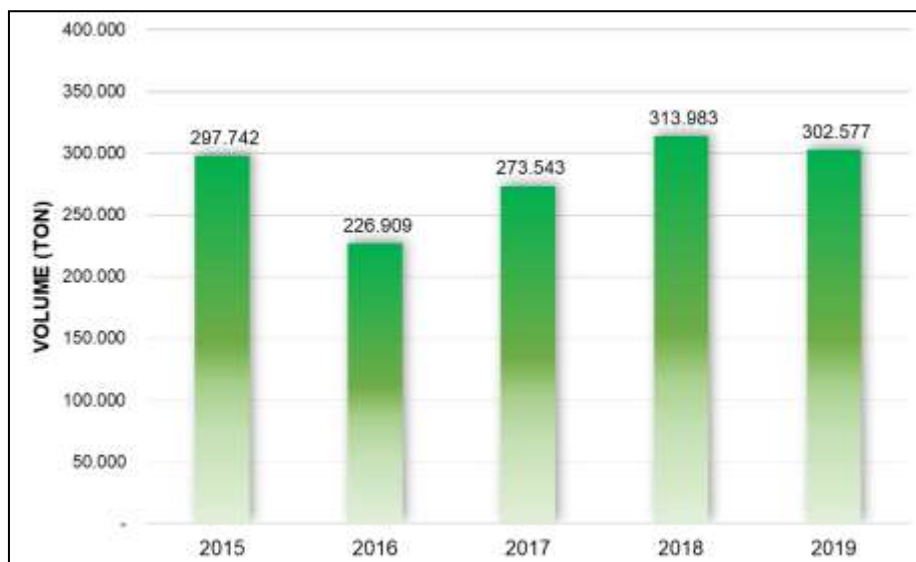
Tabel 5. Volume Ekspor Komoditas Hortikultura (ton) dan Pertumbuhan Ekspor (%) Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018

No.	Komoditas	Volume Ekspor (Ton)		Pertumbuhan (%)
		2018	2019	
1	Kentang	5.159,48	4.854,88	-5,90
2	Jamur	4.008,42	2.292,20	-42,81
3	Mangga	2.567,43	2.470,44	-3,78
4	Manggis	38.841,37	27.797,08	-28,43
5	Nanas	228.532,76	236.225,89	3,37
6	Pisang	30.377,31	22.745,02	-25,12
7	Salak	1.234,28	1.698,39	37,60
8	Jahe	3.203,12	4.444,94	38,77
9	Krisan	59,11	47,82	-19,10
Total		313.983,28	302.576,66	-3,63

Sumber : BPS, 2020.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir volume ekspor sembilan komoditas hortikultura yaitu kentang, jamur, mangga, manggis, nanas, pisang, salak, jahe dan krisan berfluktuatif seperti pada Gambar 1, dimana volume ekspor Tahun 2015 sebesar 297.742 ton, Tahun 2016 sebesar 226.909 ton, Tahun 2017 sebesar 273.543 ton, Tahun 2018 sebesar 313.983 ton dan Tahun 2019 sebesar

302.577 ton, dengan rata – rata pertumbuhan volume ekspor hortikultura sejak Tahun 2015 – 2019 sebesar 1,98 %.



Sumber : BPS, 2020

Keterangan : Volume ekspor komoditas hortikultura yang meliputi kentang, jamur, mangga, manggis, nanas, pisang, salak, jahe dan krisan (dalam satuan ton)

Gambar 1. Volume Ekspor Komoditas Hortikultura Tahun 2015 – 2019

Tabel 6 menunjukkan produksi sembilan komoditas ekspor Tahun 2018 dan 2019. Produksi hortikultura yang turun adalah komoditas jahe dan krisan.

Tabel 6. Produksi Dalam Negeri Sembilan Komoditas yang Mendukung Ekspor

No	Komoditas	Produksi (Ton)		Pertumbuhan (%)
		2018	2019 ^{*)}	
1	Kentang (Ton)	1.284.760	1.314.654	2,33
2	Jamur (Ton)	31.052	33.163	6,80
3	Mangga (Ton)	2.624.783	2.808.936	7,02
4	Manggis (Ton)	228.148	246.476	8,03
5	Pisang (Ton)	7.264.379	7.280.659	0,22
6	Nenas (Ton)	1.805.499	2.196.456	21,65
7	Salak (Ton)	896.504	955.763	6,61
8	Jahe (Ton)	207.412	174.380	-15,93
9	Krisan (Tangkai)	488.176.610	465.359.952	-4,67

Sumber : BPS, 2020

*) Berdasarkan Angka Tetap BPS Tahun 2019

Penurunan produksi jahe tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 disebabkan adanya penurunan luas tanam jahe, karena pada tahun 2015 – 2016 harga jahe jatuh, sehingga petani kurang bergairah menanam jahe. Selama 2 (dua) tahun (2017 dan 2018) tidak ada alokasi pengembangan jahe dan dukungan kegiatan lainnya. Pada tahun 2019 dialokasikan pengembangan jahe sebesar 335 Ha yang tersebar di 23 kabupaten, namun baru ditanam pada awal musim hujan yaitu bulan November dan Desember 2019 dan saat ini belum panen. Meskipun produksi jahe tahun 2019 turun, terjadi peningkatan ekspor jahe karena yang diekspor adalah produksi jahe tahun sebelumnya dalam bentuk kering (simplisia). Jahe Indonesia disukai pasar dunia karena kandungan minyak atsirinya relatif lebih tinggi dibandingkan jahe dari negara lain.

Dilihat dari sisi nilai ekspor 9 (sembilan) komoditas Tahun 2019 meningkat sebesar 6,49 % dari Tahun 2018 yaitu dari U\$262.419.250 menjadi U\$279.455.980 pada Tahun 2019. Tahun 2020 telah dilakukan identifikasi komoditas potensi ekspor hortikultura sebanyak 13 komoditas, dimana komoditas ini memiliki potensi devisa. Komoditas tersebut adalah kunyit, jahe, kapulaga, wortel, kubis, kentang, manggis, mangga, pisang, durian, nenas, salak, krisan dan dracaena.



Gambar 2. Registrasi kebun Buah Naga dan Mangga

Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor produk hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi registrasi kebun/lahan usaha, sertifikasi GAP, desa pertanian organik dan registrasi *packing house*.
2. Fasilitasi pengembangan akses pemasaran/investasi produk hortikultura di pasar luar negeri dan melakukan promosi di dalam dan luar negeri.
3. Melakukan *Business matchmaking* untuk mempertemukan eksportir dan pelaku usaha (kelompok tani).
4. Mengarahkan petani untuk menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan usaha yang berorientasi ekspor.
5. Mendorong ekspor 3 (tiga) kali lipat untuk komoditas hortikultura potensi ekspor seperti kunyit, jahe, kapulaga, wortel, kubis, kentang, manggis, mangga, pisang, durian, nenas, salak, krisan dan dracaena.

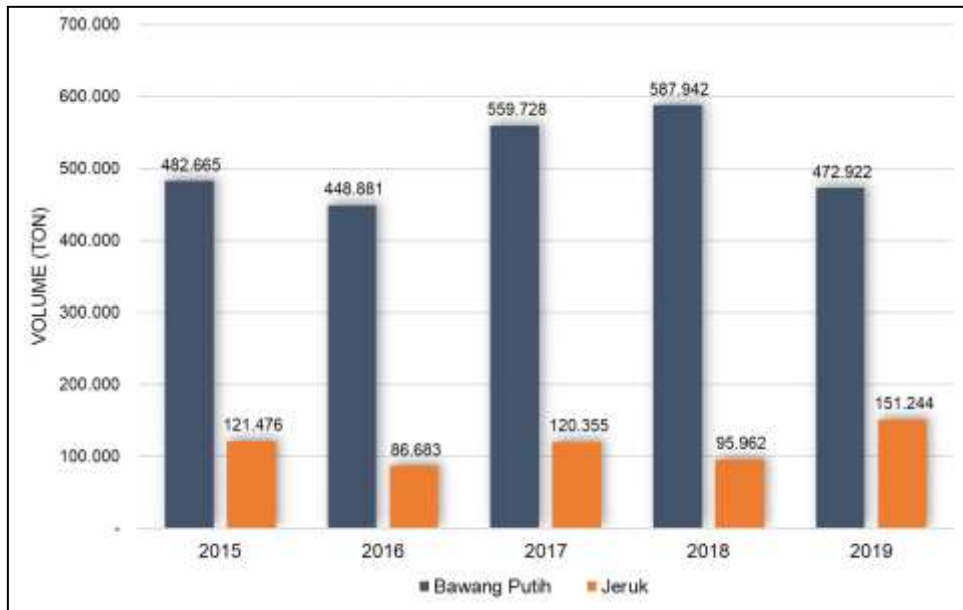
Direktorat Jenderal Hortikultura selain berusaha meningkatkan ekspor komoditas hortikultura, juga berusaha menurunkan impor untuk 2 (dua) komoditas yaitu jeruk dan bawang putih. Target penurunan 2 (dua) komoditas itu adalah 10,65 %. Sepanjang Tahun 2019, volume impor jeruk sebesar 151.244 ton dan bawang putih sebesar 472.922 ton. Penurunan impor untuk 2 (dua) komoditas ini pada Tahun 2019 adalah 8,73 %. Dengan demikian, capaian penurunan impor komoditas jeruk dan bawang putih Tahun 2019 sebesar 81,97 % dari target sebesar 10,65% atau masuk kategori berhasil.

Tabel 7. Volume Impor Komoditas Hortikultura (ton) dan Pertumbuhan Impor (%)

No.	Komoditas	Tahun		Pertumbuhan (%)
		2018	2019	
1	Jeruk	95.962,09	151.243,83	57,61
2	Bawang Putih	587.942,45	472.922,19	-19,56
Total		683.904,54	624.266,02	- 8,73

Sumber : BPS, 2020.

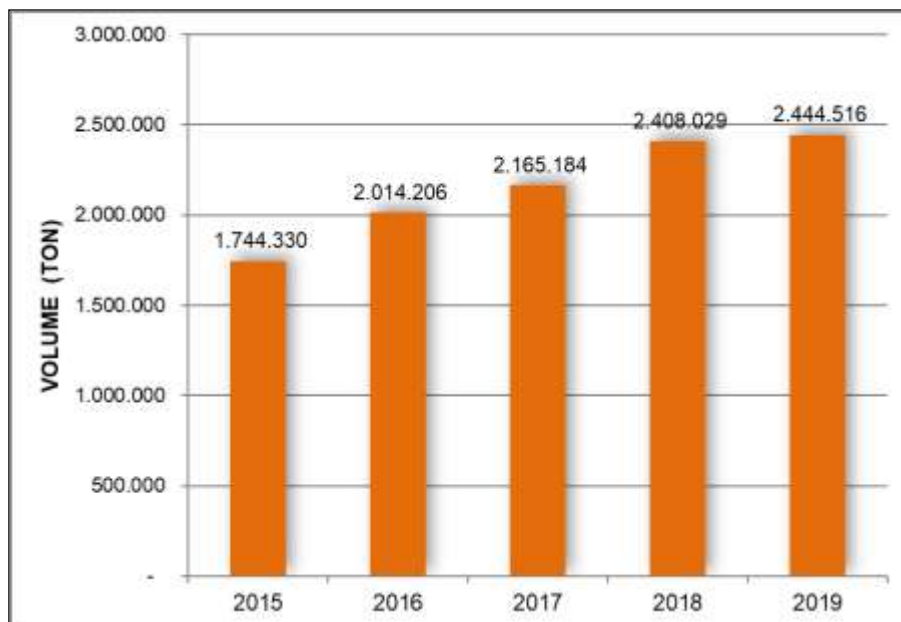
Volume impor jeruk dan bawang putih dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber : BPS, 2019.

Gambar 3. Volume Impor Komoditas Jeruk dan Bawang Putih Tahun 2015 – 2019

Produksi jeruk pada 5 (lima) tahun terakhir adalah 1.744.330 ton Tahun 2015, 2.014.206 ton pada Tahun 2016, 2.165.184 ton Tahun 2017, 2.408.029 ton pada Tahun 2018 dan 2.444.516 ton pada Tahun 2019 (Gambar 4). Produksi jeruk Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,52 % dibandingkan produksi Tahun 2018. Produksi jeruk mengalami sedikit kenaikan karena Indonesia mengalami musim kemarau panjang pada tahun 2019, kondisi seperti ini dapat mempengaruhi produksi jeruk. Tanaman jeruk membutuhkan air yang cukup untuk dapat berproduksi optimal terutama pada fase pematangan. Siklus musim hujan dan musim kemarau yang tidak normal menyebabkan pertumbuhan buah jeruk tidak stabil. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya suplai air karena kekeringan. Produksi jeruk juga dipengaruhi oleh pengurangan populasi tanaman produktif yang disebabkan karena serangan OPT.



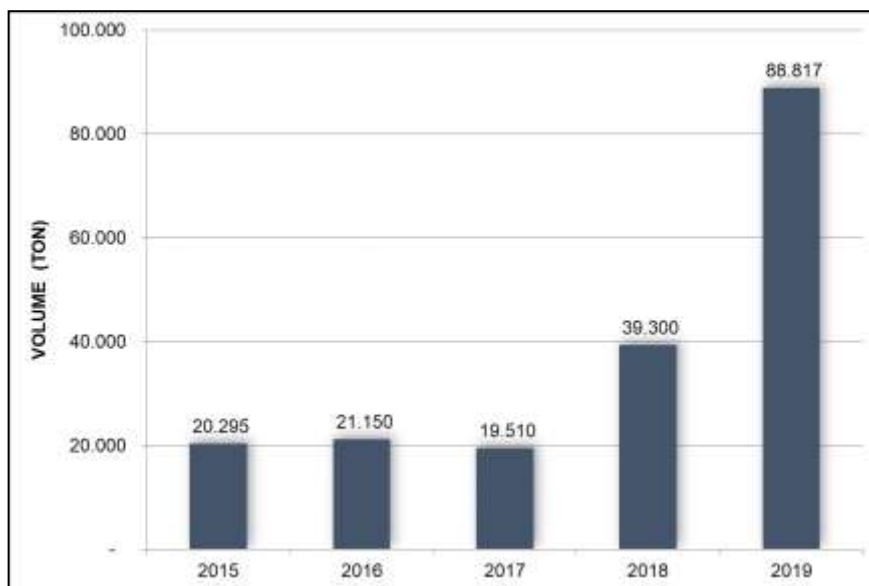
Sumber : BPS, 2020.

Gambar 4. Produksi Jeruk (Ton) Tahun 2015 – 2019

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi jeruk yang terkendala ketersediaan air adalah dengan pembuatan sarana pengairan untuk tanaman jeruk seperti embung sederhana yang dapat digunakan untuk menampung air hujan pada saat musim hujan dan dapat digunakan untuk mengairi pertanaman jeruk pada saat musim kemarau. Selain itu, perlu pendampingan secara intensif dalam budidaya jeruk terutama dalam pengendalian OPT.

Produksi bawang putih meningkat tajam, pada Tahun 2018 sebesar 39.300 ton dan 88.817 ton pada Tahun 2019 (meningkat 126 %). Peningkatan produksi bawang putih pada Tahun 2019 karena adanya pelaksanaan kegiatan pertanaman APBN 2018 sebagian besar dilakukan pada akhir tahun 2018 dan panen di tahun 2019. Selain itu, animo masyarakat untuk tanam bawang putih juga semakin tinggi sehingga menambah luas tanam swadainya. Penerapan SOP turut mendongkrak produktivitas nasional bawang putih sehingga produksi pun juga meningkat. Target pengembangan kawasan bawang putih Tahun

2019 adalah seluas 9.633 Ha di 20 Provinsi, 101 Kabupaten/Kota, luasnya target kawasan pengembangan bawang putih ini merupakan upaya dalam rangka menuju swasembada bawang putih. Adanya kebijakan wajib tanam bawang putih bagi importir yang mendapatkan Rekomendasi Izin Produk Hortikultura (RIPH) juga mengambil peran dalam meningkatkan produksi bawang putih di dalam negeri.



Sumber : BPS, 2020.

Gambar 5. Produksi Bawang Putih (Ton) Tahun 2015 – 2019

Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan impor komoditas substitusi impor adalah :

1. Peningkatan luas tanam, produksi dan produktivitas jeruk melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta penerapan GAP Buah.
2. Pemberian bimbingan teknologi (secara intensif dalam budidaya jeruk dan bawang putih terutama dalam pengendalian OPT), pendampingan dan pengawalan kepada petani/pelaku usaha.
3. Penyediaan benih jeruk dan bawang putih bermutu.
4. Mendorong peningkatan luas tanam dan produksi bawang putih dengan menumbuhkan sentra-sentra baru di luar pulau Jawa.

5. Membuat *Roadmap* menuju swasembada bawang putih dengan melibatkan partisipasi dari pelaku usaha impor melalui ketentuan yang tertuang di dalam Permentan Nomor 38 Tahun 2018 tentang RIPH.

Upaya yang terus dilakukan di masa mendatang agar penurunan impor komoditas substitusi impor dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan luas tanam, produksi dan produktivitas serta penerapan GAP
2. Penyediaan sarana pertanian untuk mendukung produksi seperti pembuatan embung yang digunakan untuk menampung air hujan untuk mengairi pertanaman pada saat musim kemarau dan sarana irigasi untuk menjamin kebutuhan air terutama pada musim kemarau.
3. Menyediakan teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim (kelebihan hujan dan kekeringan).
4. Pemberian bimbingan teknologi (secara intensif dalam budidaya terutama dalam pengendalian OPT), penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan kepada untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun di daerah.
5. Penyediaan benih bermutu terutama yang spesifik lokasi pengembangan
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas bawang putih. Kualitas benih yang berukuran besar dan bermutu baik menjadi faktor utama keberhasilan pertanaman. Indikatornya antara lain ukuran umbi yang dihasilkan cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan nasional
7. Penggunaan *cold storage* untuk mempercepat masa dormansi benih bawang putih (teknologi vernalisasi) serta penggunaan *instore dryer* untuk mempercepat pengeringan
8. Menerapkan kebijakan wajib tanam dan produksi bawang putih bagi pemegang RIPH, diiringi pengawasan pelaksanaan di lapangan dengan melibatkan dinas pertanian setempat

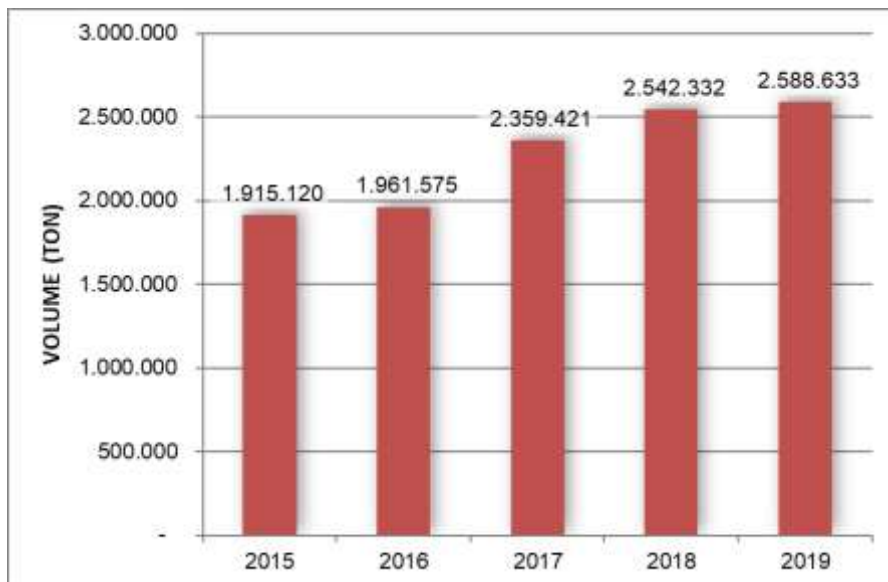


Gambar 6. Pengembangan Kawasan Jeruk di Kabupaten Malang, Jawa Timur

3.2.1.2. Sasaran Program 2 (SP02) Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Strategis Tanaman Hortikultura

Sasaran Program nomor 2 memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu (1) produksi cabai dan (2) produksi bawang merah.

Produksi cabai tahun 2019 sebesar 2.588.633 ton atau 112,77 % dari target sebesar 2.295.481 ton, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit sebesar 1.374.215 ton dan cabai besar sebesar 1.214.418 ton. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, produksi cabai cenderung meningkat di setiap tahun dengan rata-rata sebesar 8.07 %.



Sumber : BPS, 2020.

Gambar 7. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2015 – 2019

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2019 melalui pengaturan pola tanam berbasis kebutuhan riil, budidaya ramah lingkungan, penguatan kawasan penyangga Jabodetabek dan pengembangan sentra baru di luar Jawa serta inisiasi pembentukan korporasi.

Pengaturan pola tanam berbasis kebutuhan riil dilakukan secara nasional yang kemudian dirinci menjadi pola tanam provinsi dan kabupaten. Setiap daerah mempunyai target untuk menyediakan luas tanam baru setiap bulan yang dapat mencukupi kebutuhan cabai 3 (tiga) bulan berikutnya. Tujuan pengaturan pola tanam ini adalah agar dapat mengatur keseimbangan *supply demand* sehingga stabilisasi pasokan dan harga dapat terjaga yang akhirnya berdampak pada berkurangnya inflasi. Secara umum, produksi cabai mencukupi di tahun 2019, meskipun di pertengahan tahun sempat terjadi gejolak harga dikarenakan berkurangnya produksi yang diakibatkan karena faktor musim kemarau dan penerapan pola tanam belum optimal di beberapa daerah serta masih adanya ketergantungan pasokan cabai dari daerah lain.

Penerapan budidaya ramah lingkungan lebih menekankan pada kegiatan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan mengurangi penggunaan pestisida kimia. Berdasarkan hasil Analisa Usaha Tani Cabai, penggunaan pestisida kimia memberikan kontribusi biaya produksi sebesar 30 – 40 %. Namun dengan penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan melalui penggunaan pestisida nabati, perangkap hama, likat kuning, tanaman border, dan pengendalian OPT ramah lingkungan lainnya, kontribusi biaya produksinya menjadi lebih rendah, yaitu hanya sekitar 10 – 15%. Saat ini petani atau kelompok tani mulai menyadari bahwa pengendalian OPT menggunakan pestisida kimia membutuhkan biaya yang lebih tinggi sedangkan permodalan petani terbatas, sehingga petani atau kelompok tani secara bertahap melakukan budidaya cabai secara ramah lingkungan. Pengendalian OPT ramah lingkungan menjaga kondisi ekosistem lebih sehat bagi tanah, air,

tanaman, dan kehidupan hewan di dalam tanah, maupun predator/musuh alami dan produk yang dihasilkan lebih aman dikonsumsi.

Penguatan kawasan cabai penyangga Jabodetabek diperuntukkan bagi sentra di Pulau Jawa yang menjadi pemasok utama pasar Jabodetabek. Sedangkan pengembangan sentra baru di luar Pulau Jawa bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan lokal agar tidak bergantung pasokan dari luar daerah.

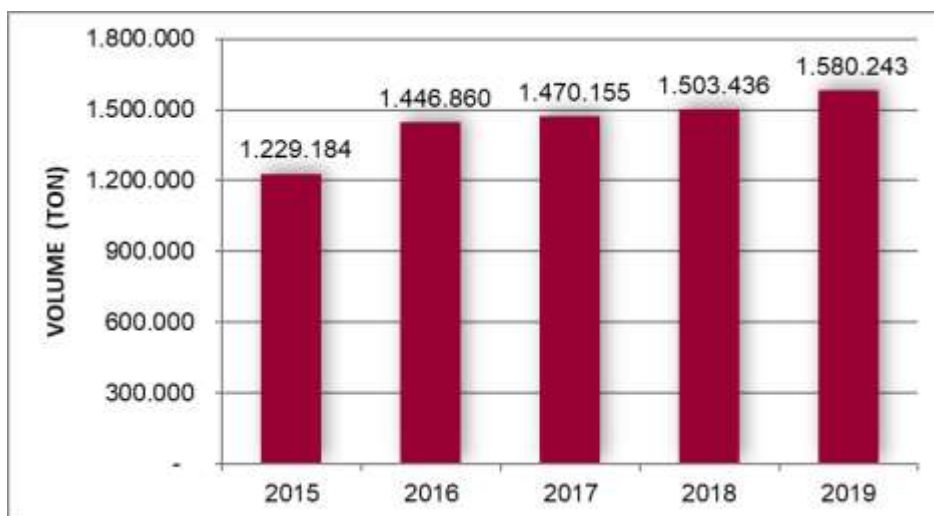
Ditjen Hortikultura mendorong pembentukan korporasi di sentra yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam rantai pemasaran. Strategi yang dapat ditempuh yaitu peningkatan kualitas produk yang dihasilkan dan mempertahankan kontinuitas produksi dengan mengatur manajemen pola tanam, industrialisasi hulu – hilir usaha tani serta pemasaran kolektif. Inisiasi pembentukan korporasi petani cabai saat ini baru dilaksanakan di Kabupaten Cianjur melalui kegiatan koperasi yang bernama “Koperasi Pemasaran Maju Berkah Mandiri” dan sudah berbadan hukum.



Gambar 8. Kawasan Aneka Cabai Tahun 2019

Untuk tahun – tahun selanjutnya beberapa hal yang akan dilaksanakan untuk dapat mempertahankan peningkatan produksi aneka cabai adalah menyusun pola tanam 2020 baik berdasarkan data ATAP dan kebutuhan riil, konsistensi daerah untuk melaksanakan manajemen pola tanam, mendorong percepatan proses pengadaan bantuan dari APBN, mendorong penerapan sistem budidaya ramah lingkungan serta komunikasi yang efektif antara pusat, daerah dan *Champion*.

Indikator kinerja lain pada sasaran program terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura adalah produksi bawang merah. Pada Tahun 2019 produksi bawang merah mencapai 1.580.243 ton atau 105,63 % dari target sebesar 1.495.993 ton sehingga masuk kategori sangat berhasil. Produksi bawang merah sepanjang Tahun 2015 sampai 2019 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,67 %.



Sumber BPS, 2020.

Gambar 9. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2015 – 2019

Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi bawang merah Tahun 2019 adalah mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong penggunaan benih biji (TSS) dan menerapkan budidaya ramah lingkungan. Alokasi APBN difokuskan untuk pengembangan di luar sentra eksisting dan

pulau Jawa. Saat ini, pengembangan bawang merah telah menyebar di wilayah *shortage* bawang merah dan muncul sentra-sentra baru seperti di Kabupaten Tapin, Belu, Bengkayang dan sebagainya. Selain itu adanya kebijakan tidak membuka keran impor bawang merah semakin memacu produksi di dalam negeri.

Untuk tahun mendatang beberapa hal yang akan dilaksanakan untuk dapat mempertahankan peningkatan produksi aneka bawang merah adalah :

1. mendorong penggunaan TSS (*true shallot seeds*) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas bawang merah
2. mengurangi *loses* pada saat panen dan pascapanen (penurunan 2 % per tahun) dengan penggunaan teknologi *instore dryer* untuk mempercepat pengeringan dan mengurangi susut



Gambar 10. Hasil Panen dan Kawasan Aneka Bawang Merah Tahun 2019

3.2.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Tersedianya Infrastruktur Pertanian Pasca Panen Tanaman Hortikultura yang Sesuai dengan Kebutuhan

Sasaran Program nomor 3 memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura).

Rasio tersedianya alat dan mesin pertanian berdasarkan kebutuhan pascapanen hortikultura tahun 2019 sebesar 100% dari target sebesar 90 %

sehingga capaiannya sebesar 111 %. Pencapaian ini termasuk kategori sangat berhasil.

Penanganan pascapanen hortikultura merupakan salah satu mata rantai dalam pencapaian standar mutu produk hortikultura. Aneka ragam produk hortikultura sebelum dipasarkan ke berbagai pasar atau dijual langsung kepada konsumen, perlu mengalami perlakuan penyiapan yang pada umumnya dilakukan di bangsal pascapanen (*packing house*). Walaupun petani sudah menghasilkan aneka produk hortikultura bermutu baik, namun seringkali masih terjadi kehilangan hasil yang tinggi dan rendahnya ketersediaan produk hortikultura sesuai standar mutu.

Alat dan mesin pertanian pascapanen hortikultura yang difasilitasi pada tahun 2019 adalah bangsal pascapanen dan alat mesin pascapanen untuk komoditas cabai dan bawang merah serta komoditas hortikultura lainnya, seperti gerobak motor roda tiga, timbangan, gerobak dorong, troli, *blower*, terpal plastik, keranjang panen, palet kayu atau alat *packing*. Bangsal dan alat – alat ini tersebar di beberapa lokasi seperti pada Tabel 8. Target alat dan mesin pascapanen yang difasilitasi adalah sejumlah 263 unit yang terdiri dari alat pascapanen untuk cabai dan bawang merah sebanyak 150 unit dan untuk hortikultura lainnya sebanyak 113 unit. Seluruh alat dan mesin pascapanen telah didistribusikan dan dimanfaatkan oleh penerima sesuai target awal yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Fasilitasi Alat dan mesin pertanian Pascapanen Hortikultura Tahun 2019

No	Provinsi/Kab/Kota	Sarana Prasarana Pascapanen	
		Cabai dan Bawang Merah	Hortikultura Lainnya
1	Kab Solok	5	1
2	Kab Garut	2	1
3	Kab Majalengka	1	1
4	Kab Cianjur	1	2
5	Kab Magelang	1	1
6	Kab Temanggung	1	1

No	Provinsi/Kab/Kota	Sarana Prasarana Pascapanen	
		Cabai dan Bawang Merah	Hortikultura Lainnya
7	Kab Malang	2	1
8	Kab Lumajang	1	1
9	Kab Lombok Timur	2	1
10	Kab Sumbawa	1	1
11	Kab Tabanan	1	1
12	Kab Minahasa	-	1
13	Kab Minahasa Selatan	1	-
14	Kab Banyuwangi	1	1
15	Kab Majene	1	1
16	Aceh	7	2
17	Sumatera Utara	8	7
18	Sumatera Barat	7	7
19	Riau	2	2
20	Jambi	3	2
21	Sumatera Selatan	5	8
22	Bengkulu	6	4
23	Lampung	4	5
24	Jawa Barat	10	10
25	Jawa Tengah	12	2
26	DI Yogyakarta	3	2
27	Jawa Timur	12	12
28	Kalimantan Barat	1	3
29	Kalimantan Tengah	1	1
30	Kalimantan Selatan	5	1
31	Kalimantan Timur	-	2
32	Sulawesi Utara	3	-
33	Sulawesi Tengah	1	-
34	Sulawesi Selatan	10	7
35	Sulawesi Tenggara	2	1
36	Bali	2	3
37	Nusa Tenggara Barat	4	3
38	Nusa Tenggara Timur	4	3
39	Maluku	6	3
40	Maluku Utara	2	-
41	Banten	3	3

No	Provinsi/Kab/Kota	Sarana Prasarana Pascapanen	
		Cabai dan Bawang Merah	Hortikultura Lainnya
42	Bangka Belitung	2	-
43	Gorontalo	3	2
44	Kepulauan Riau	-	2
45	Sulawesi Barat	1	1
	Jumlah	150	113
	Grand Total	263	

Kebijakan mendorong penanganan pascapanen diarahkan pada pembinaan dan bimbingan teknis serta dukungan fasilitasi bangsal pascapanen atau gudang pengering dan peralatan pascapanen lainnya pada pengembangan kawasan, komoditas utama terutama cabai dan bawang serta komoditas yang berpotensi dan berorientasi ekspor maupun komoditas yang masif. Langkah operasional yang telah dilakukan antara lain fasilitasi peralatan pascapanen, pengadaan bangsal pascapanen, dan bimbingan teknis pascapanen.

Kegiatan yang akan dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan hasil produk hortikultura dan mengurangi kehilangan hasil adalah sebagai berikut :

1. memberikan bimbingan teknis penanganan pascapanen hortikultura secara tepat sasaran melalui bimbingan teknologi atau sekolah lapang GHP hortikultura serta pembinaan dan pengawalan kegiatan pascapanen;
2. menyusun buku pedoman pascapanen hortikultura;
3. memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana pascapanen berupa bangunan bangsal pascapanen dan atau alat pascapanen di kawasan sentra produksi hortikultura untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing; dan
4. melakukan pendampingan untuk pemenuhan persyaratan registrasi bangsal pascapanen.



Gambar 11. Bantuan Bangsal dan Alat Pascapanen Tahun 2019

3.2.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI Pada Tanaman Hortikultura

Sasaran Program Nomor 4 memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu Rasio serangan OPT terhadap luas tanam tanaman hortikultura. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Tahun 2019, telah berkontribusi terhadap pengamanan produksi hortikultura utama, melalui pengendalian OPT, serta adaptasi atau mitigasi DPI dan Bencana Alam. Disamping itu produk hortikultura yang dihasilkan aman dikonsumsi dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional. Capaian pengamanan produksi hortikultura dari serangan OPT tahun 2019 ditunjukkan dengan rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam rata-rata sebesar 4,22% dari target maksimal 5% atau capaian sekitar 118,48 % (kategori sangat berhasil).

Dalam rangka mengantisipasi penurunan ketersediaan hortikultura, pendekatan strategis merupakan langkah awal yang paling tepat dan harus segera diupayakan secara sistematis dan menyeluruh. Upaya tersebut menyangkut inventarisasi dan identifikasi wilayah rawan (banjir dan kekeringan) serta langkah antisipasi dan mitigasinya. Untuk itu, diperlukan fasilitasi sarana prasarana penanganan DPI yang dibutuhkan petani dalam mengantisipasi DPI. Realisasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam sebesar 754 Ha (97,92%) dari 770 Ha.

Tabel 9. Perkembangan Luas Serangan OPT Dibandingkan Luas Tanam Hortikultura Tahun 2018 – 2019

No	Uraian	Nilai LS/LT (%)	
		2018	2019
1	Cabai		
	Luas Tanam (LT) (Ha)**	370.180,88	322.793,64
	Luas Serangan (LS) OPT (Ha)	21.480,30	21.532,42
	Rasio LS/LT	5,8	6,67
2	Bawang Merah		
	Luas Tanam (LT) (Ha) **)	173.477,53	165.760,56
	Luas Serangan (LS) OPT (Ha)	6.381,10	5.404,59
	Rasio LS/LT	3,68	3,26
3	Hortikultura Lainnya		
	Luas Tanam (LT) (Ha) **)	542.628,90	608.721,52
	Luas Serangan (LS) OPT (Ha)***)	8.263,30	16.545,32
	Rasio LS/LT	1,52	2,72
Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam Tanaman Hortikultura		3,67	4,22

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2020

Keterangan : *) Nilai LS / LT, perbandingan luas serangan OPT terhadap luas tanam

***) Luas tanam diasumsikan 8% lebih besar dari luas panen

****) Data sementara, belum semua data terkumpul (data OPT dan data luas tanam) Sayuran : cabai, bawang merah, bawang putih, kentang. Buah : mangga, manggis, jeruk, pisang, nanas, salak

Penetapan perkembangan luas serangan OPT sebagaimana tersebut pada Tabel 9, mengacu pada jenis dan jumlah komoditas potensi ekspor dan substitusi impor yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, jeruk, pisang, mangga, manggis, nanas, salak, jahe, krisan, dan jamur. Dari ketiga belas komoditas tersebut, terdapat 3 (tiga) komoditas, dimana data luas serangan OPT belum melaporkan dengan lengkap, yaitu jahe, krisan, dan jamur. Selain itu, yang terkait dengan data luas serangan OPT bawang putih mulai dilaporkan pada tahun 2018.

Dari kompilasi data sebagaimana tersebut di atas, bahwa melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 2019 berhasil mengamankan produksi sebesar 95,78% dari target yang telah ditetapkan yaitu minimal 95%.

Penghitungan rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam sebagaimana tersebut pada Tabel. 8 berdasarkan kelompok OPT utama, OPT lainnya, dan OPT kompleks. Pengelompokan OPT utama berdasarkan data luas serangan OPT tertinggi dari rekapitulasi data yang dilakukan secara periodik setiap bulan. Data luas serangan OPT Hortikultura Tahun 2018 dan 2019 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Data Luas Serangan OPT Hortikultura Tahun 2018 dan 2019 (Ha)

Komoditas	OPT	2018	2019
Cabai OPT Utama		4.470,40	15.431,84
	Antraknosa	4.557,40	4.372,90
	Virus Kuning	3.166,90	2.233,05
	Trips	3.704,80	3.670,68
	Lalat Buah	2.633,00	2.365,20
	Kutu Daun	1.837,40	1.483,91
	OPT Lainnya		16.851,70
Luas Serangan OPT Kompleks		21.322,10	21.532,42
Bawang Merah OPT Utama		5.352,20	4.638,52
	Ulat Bawang	3.400,40	3.100,62
	Trotol	1.279,20	948,10
	Layu	424,5	292,20
	Fusarium		
	Mati Pucuk	146,7	204,44
	Antraknosa	101,4	93,16
OPT Lainnya		810,2	766,07
Luas Serangan OPT Kompleks		6.162,40	5.404,59
Hortikultura lainnya*) Luas Serangan OPT Kompleks			16.545,52

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2019

Keterangan : *) Bawang Putih, Kentang, Jeruk, Manggis, Mangga, Salak, Nenas, dan Pisang

Kehilangan hasil hortikultura akibat serangan OPT serta dampak perubahan iklim dan bencana alam adalah a) cabai 96,895 ton, b) bawang merah 21.618,36 ton. Angka kehilangan hasil hortikultura lainnya hanya berdasarkan data luas serangan OPT kompleks.

Keberhasilan pengamanan produksi hortikultura ini antara lain disebabkan oleh peningkatan pengelolaan OPT hortikultura, koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaku perlindungan, serta peningkatan sosialisasi/penyebarluasan informasi terkait pengelolaan OPT hortikultura.

Upaya-upaya yang dilakukan di tahun mendatang untuk meningkatkan pengamanan produk hortikultura terhadap OPT dan DPI adalah :

1. Melakukan bimbingan teknis teknologi pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan sesuai dengan sistem PHT;
2. Melaksanakan Gerakan Pengendalian OPT cabai dan bawang merah dilaksanakan dengan menggunakan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan, dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT secara langsung;
3. Penguatan kelembagaan sistem perlindungan hortikultura khususnya pada Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) dan Klinik Pengendalian hama terpadu (PHT) yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan Agens Hayati;
4. Penerapan PHT (PPHT): Kegiatan PPHT merupakan salah satu metode penyebarluasan teknologi pengendalian OPT yang bersifat lokal dan ramah lingkungan. Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT) diawali melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT). Kegiatan PPHT dilaksanakan dalam siklus kegiatan mengalami, menganalisis, mengumpulkan dan menerapkan. Prinsip PPHT adalah mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengelolaan OPT berdasarkan prinsip – prinsip PHT/pengelolaan lingkungan. Pelaksanaannya dilakukan di lokasi pertanaman yang dibudidayakan oleh kelompok tani atau peserta, selama satu siklus atau periode waktu budidaya hortikultura;

5. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Dalam rangka mengantisipasi penurunan ketersediaan hortikultura, diupayakan secara sistematis dan menyeluruh, menyangkut inventarisasi dan identifikasi wilayah rawan (banjir dan kekeringan) serta langkah antisipasi dan mitigasinya. Untuk itu, diperlukan fasilitasi sarana prasarana penanganan DPI yang dibutuhkan petani dalam mengantisipasi DPI; dan

6. Peningkatan kompetensi petugas perlindungan tanaman melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan petugas, magang, mengikuti seminar, lokakarya, gelar teknologi dan lain – lain.

3.2.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura

Sasaran program Nomor 5 memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011).

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

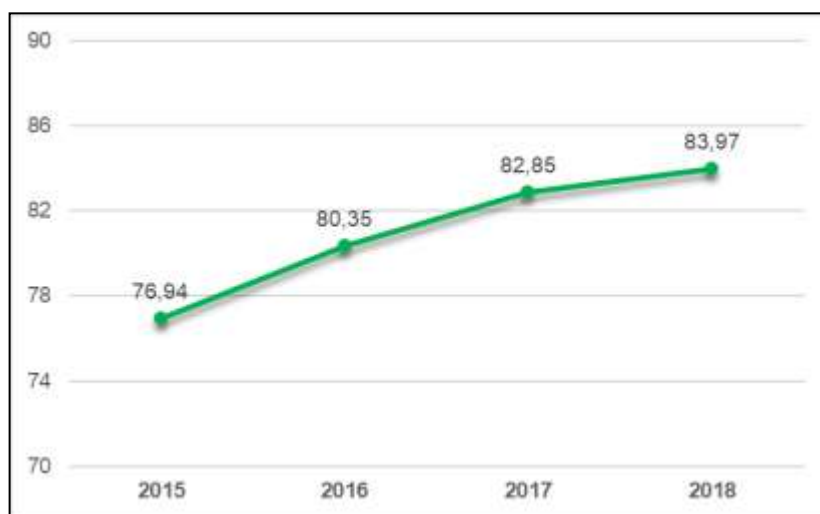
Evaluasi ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: 1) memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu unit kerja; 2) menilai akuntabilitas kinerja pada unit kerja;

3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas; dan 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian berisi rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura dan minimal unit kerja Eselon II Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian yang menggambarkan kinerja utama.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 belum didapat karena evaluasi ini akan dilakukan sekitar bulan Maret – April 2020.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura pada 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik yaitu 76,94 di tahun 2015; 80,35 di tahun 2016; 82,85 pada tahun 2017; dan 83,97 pada Tahun 2018 seperti pada Gambar 13. Evaluasi ini dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.



Gambar 12. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2015 – 2018

Nilai Kinerja (NK) merupakan indikator kedua yang menggambarkan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada Penyusunan PK, Nilai Kinerja (NK) ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 249 Tahun 2011. Namun demikian dalam perjalanannya terdapat peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang mengatur penilaian kinerja yaitu PMK Nomor 214 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017.

Pada PMK Nomor 214 tahun 2017, terdapat 3 level penilaian kinerja yaitu Nilai Kinerja pada level Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja pada level Eselon I/ Program, dan Nilai Kinerja pada level Satuan Kerja (Satker). Capaian Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 mencapai 80,27 atau mencapai 108,47 % dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 74 atau dikategorikan sangat berhasil.

Nilai Kinerja pada level Satker yang ditampilkan pada aplikasi SMART merupakan capaian Nilai Kinerja pada aspek implementasi yang ditentukan oleh empat parameter dengan bobot yang berbeda-beda yaitu : 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%; 2) efisiensi dengan bobot 28,6%; 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%; dan 4) realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.

Sedangkan pada Nilai Kinerja level Eselon I/Program merupakan capaian Nilai Kinerja yang ditentukan oleh :

- a. Nilai Kinerja Aspek Implementasi (NKI) dengan bobot 33,3% terdiri atas :
 - 1) capaian keluaran/output kegiatan/program dengan bobot 43,5%; 2) efisiensi dengan bobot 28,6%; 3) konsistensi serapan anggaran terhadap perencanaan (DIPA) dengan bobot 18,2%; dan 4) realisasi anggaran dengan bobot 9,7%.
- b. Nilai Kinerja aspek manfaat (*outcome*) atau Capaian Sasaran Program (CSP) dengan bobot 66,7%.

c. Rata-rata Nilai Kinerja Satker lingkup Eselon I

Rumus penghitungan Nilai Kinerja pada level Eselon I/Program adalah sebagai berikut :

$$NKP = \frac{\text{Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat} + \text{rata - rata nilai satker}}{2}$$

Nilai Kinerja Program Direktorat Jenderal Hortikultura pada aplikasi SMART sampai dengan Tanggal 28 Januari 2020 adalah sebesar 80,27 % sehingga dapat termasuk kategori penilaian “Baik” berdasarkan penilaian PMK Nomor 214 Tahun 2017, dengan rincian seperti ditampilkan pada Gambar 14.



Gambar 13. Capaian Nilai Kinerja Tahun 2019

Namun demikian, dari Gambar 14 terlihat bahwa rata – rata Nilai Kinerja Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura masih rendah atau belum mencapai target NK nasional. Nilai rata – rata Satker lingkup Ditjen Hortikultura per tanggal 28 Januari 2020 adalah sebesar 72,19. Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya rata – rata Nilai Kinerja Satker antara lain karena :

1. Tidak tertibnya petugas pelaporan Satker dalam melaporkan capaian keluaran bulanan (realisasi volume keluaran) dan capaian indikator keluaran kegiatan per semester;

2. Masih banyak Satker yang tidak konsisten antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana;
3. Beberapa Satker daerah memiliki realisasi serapan anggaran yang rendah atau tidak mencapai target output yang telah ditetapkan karena permasalahan teknis dan administrasi, contohnya tidak tercapainya output kawasan bawang putih seluas 643 Ha;
4. Terdapat beberapa indikator sasaran program yang tidak mencapai target seperti pertumbuhan ekspor yang negatif dan penurunan volume impor yang tidak tercapai target; dan
5. Masih belum efisiennya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker pusat dan daerah.

Upaya yang akan dilakukan agar nilai kinerja lebih baik di tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk petugas pelaporan daerah dalam melakukan pengisian aplikasi SMART serta melakukan bimbingan teknis atau pelatihan petugas pelaporan secara berkala
2. Melakukan sosialisasi penilaian nilai kinerja kegiatan secara kontinu kepada satker – satker mandiri
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar menjadi *early warning* dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga potensi masalah yang akan muncul dapat diatasi.

3.2.2. Realisasi Keuangan

Analisis pencapaian kinerja keuangan dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu sesuai PK sebesar Rp1.040.063.787.000,00. Realisasi keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan online monitoring SPAN per tanggal 28 Januari 2020

menurut jenis kewenangan adalah sebesar Rp944.676.148.736,00 atau 90,83%, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2019 berdasarkan Kewenangan Instansi

No	Kegiatan	Pagu (Rp 000)	Realisasi ^{*)}	
			(Rp 000)	(%)
1	Pusat	150.699.897	140.150.408	93,00
2	Daerah	889.363.890	804.525.741	90,46
	Dekonsentrasi	136.912.270	129.944.619	94,91
	Tugas Pembantuan	752.451.620	674.581.122	89,65
TOTAL		1.040.063.787	944.676.149	90,83

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 28 Januari 2020.
diolah berdasarkan laporan *online monitoring span*
(<http://spanint.kemenkeu.go.id>)

Adapun realisasi Tahun 2019 berdasarkan jenis belanja dan kegiatan utama dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan Jenis Belanja TA 2019

Jenis Belanja	Pagu (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	(%)
Belanja Pegawai	23.834.531	23.643.998	99,20
Belanja Barang	1.009.855.840	914.738.457	90,58
Belanja Modal	6.373.416	6.293.694	98,75
Total	1.040.063.787	944.676.149	90,83

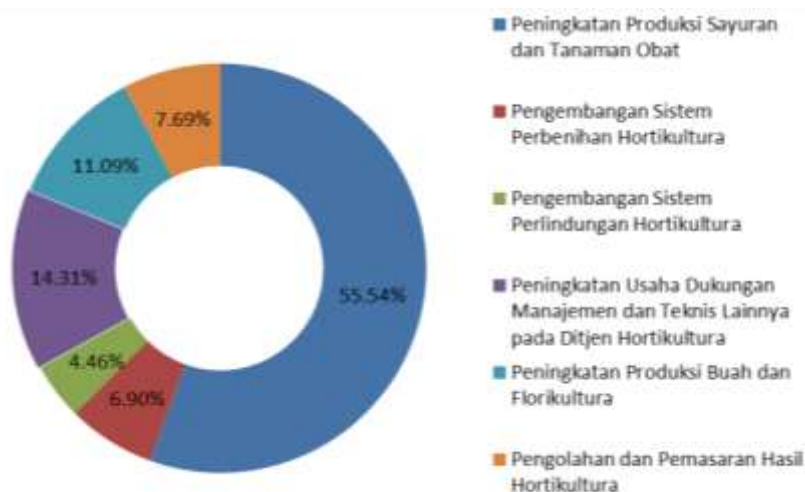
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 28 Januari 2020.
diolah berdasarkan laporan *online monitoring span*
(<http://spanint.kemenkeu.go.id>)

Tabel 13. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun 2019 berdasarkan Kegiatan Utama

No	Kegiatan	Pagu (Rp 000)	Realisasi ^{*)}	
			(Rp 000)	(%)
1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	577.688.932	510.835.040	88,43
2	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	71.793.950	65.226.576	90,85
3	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	46.406.163	44.718.621	96,36
4	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura	148.799.270	140.087.212	94,15
5	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	115.388.251	108.220.818	93,79
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	79.987.221	75.587.882	94,50
TOTAL		1.040.063.787	944.676.149	90,83

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 28 Januari 2020.
diolah berdasarkan laporan *online monitoring span*
(<http://spanint.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019, dapat dilihat pada Gambar 14 terlihat bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat yaitu sebanyak 55,54 %, sedangkan porsi terkecil yaitu 4,46 % dialokasikan untuk peningkatan Sistem Perlindungan Hortikultura.



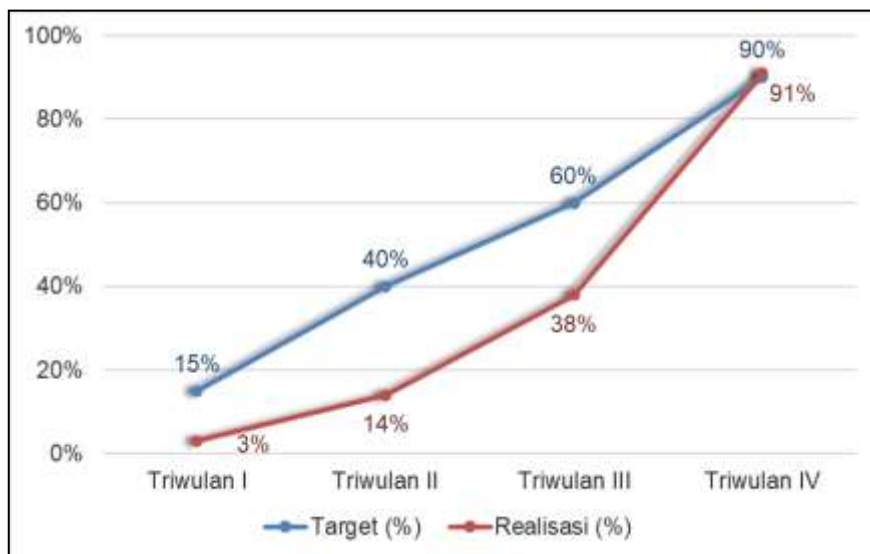
Gambar 14. Proporsi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura menurut Kegiatan Utama Tahun 2019

Adapun penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per triwulanan disajikan pada Tabel 14 dan Gambar 15. Target serapan secara proporsi penyerapan anggaran per triwulan yaitu Triwulan I (15%), Triwulan II (40 %), Triwulan III (60%) dan Triwulan IV (90%).

Tabel 14. Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 per Triwulanan

Triwulan	Pagu (Rp,000)	Target		Realisasi	
		(Rp 000)	%	(Rp,000)	%
TW I	1.040.378.419	156.056.763	15	35.553.931	3
TW II	1.040.378.419	416.151.368	40	144.422.607	14
TW III	1.040.378.419	624.227.051	60	396.740.913	38
TW IV	1,040.063.787	936.057.408	90	944.676.149	91

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, per tanggal 28 Januari 2020
diolah berdasarkan laporan *online monitoring span*
(<http://spanint.kemenkeu.go.id>)



Gambar 15. Serapan Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 per-triwulanan.

Dari Gambar 15 di atas menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan anggaran mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan target, hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya *refocusing* anggaran pada bulan Februari 2019 untuk kawasan bawang merah dan Oktober 2019 ada realokasi kawasan sayuran lainnya (khusus kawasan bawang putih). Hal ini menyebabkan adanya perubahan penerima manfaat serta pergeseran jadwal tanam pelaksanaan kegiatan di lapangan akibat penyesuaian volume output bawang putih.
2. Untuk kawasan sayuran lainnya (khusus kawasan bawang putih), pelaksanaannya menunggu ketersediaan benih yaitu pada triwulan III dan IV, terkendala dengan harga benih yang lebih tinggi dari pada harga pagu, bantuan melewati waktu tanam petani sehingga dilakukan perubahan CPCL, serta adanya pelaksanaan tender ulang yang disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan.
3. Untuk kawasan buah menunggu adanya ketersediaan air. Musim hujan ada pada Triwulan IV, sehingga pengadaan barang untuk kawasan buah mengikuti pola iklim ini.
4. Output – output kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran pada *refocusing* di bulan Oktober 2020 baru dapat melaksanakan kegiatan di triwulan IV seperti output benih buah lainnya dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam.
5. Satker – satker yang mendapat alokasi kegiatan yang mendukung Program SERASI seperti Provinsi Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan terhambat pelaksanaannya karena belum selesainya kawasan rawa. Oleh karena itu, satker – satker tersebut mengalihkan penerima manfaat ke wilayah yang bukan rawa.
6. Satker – satker yang mendapat output kawasan sayuran lainnya (khusus kawasan bawang putih) menyampaikan ketidakmampuan dalam melaksanakan kegiatan setelah dilakukan realokasi anggaran di bulan Oktober 2019. Hal ini berakibat tidak terserapnya anggaran kawasan bawang putih seluas 643 ha karena kendala berikut ini :
 - a. terbatasnya benih bersertifikat
 - b. penangkar benih terpusat di Jawa dan NTB
 - c. belum ada varietas spesifik lokasi

- d. belum adanya jaminan pasar dan okupasi
- e. kemampuan budidaya bawang putih belum banyak dikuasai petani
- f. ketidaksesuaian lahan dan agroklimat
- g. terbatasnya waktu lelang

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan upaya percepatan pada satker di wilayah Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat. Dasar pemilihan satker – satker ini adalah satker dengan anggaran besar dan adanya indikasi permasalahan dalam satker yang harus diselesaikan. Kegiatan ini melibatkan direktorat teknis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan Sekretariat Ditjen Hortikultura (Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan serta Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi);
2. Melakukan kegiatan evaluasi pengembangan hortikultura dengan mengundang pelaksana kegiatan dan petugas monitoring dan evaluasi dari seluruh satker. Kegiatan ini dilakukan dengan metode *workshop* untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang terjadi di daerah;
3. Rapat pimpinan lingkup eselon II dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Hortikultura secara berkala dilakukan untuk memantau progres kegiatan serta membahas permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan isu – isu strategis lainnya;
4. Mengirim surat kepada seluruh satker agar segera melakukan percepatan anggaran dan memberikan arahan kepada KPA melakukan upaya percepatan realisasi dan memberikan peringatan kepada satker yang belum ada perubahan signifikan akan dipertimbangkan untuk dilakukan realokasi anggaran ke satker lain;

5. Menghimbau kepada seluruh pelaksana kegiatan agar dapat melakukan pendekatan dengan pihak ULP di masing – masing daerah dalam rangka mempercepat proses pengadaan;
6. Melakukan koordinasi, monitoring dan pendampingan pelaksanaan kegiatan ke satker – satker yang realisasi anggaran dan absensi pelaporannya rendah; dan
7. Melakukan monitoring realisasi anggaran dan output kegiatan setiap hari dan diinformasikan kepada koordinator pelaporan yang ada disetiap direktorat teknis lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam rangka memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura kedepan, berikut adalah beberapa hal yang harus menjadi penekanan tindak lanjut ke depan atas permasalahan penyerapan anggaran ini :

1. Mematuhi anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan target - target serapan triwulanan sehingga fokus kegiatan dapat lebih terarah utamanya dalam kaitannya dengan serapan dan realisasi kegiatan.
2. Kegiatan – kegiatan yang tidak berhubungan dengan musim tanam dilaksanakan pada awal tahun.
3. Pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga pada saatnya pengalih tugas tidak terhambat.
4. Identifikasi CPCL dilakukan segera setelah DIPA terbit.
5. Hasil pemantauan realisasi anggaran, capaian output serta progres pengadaan di daerah akan disampaikan ke semua eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura setiap bulan sebagai bahan informasi dan evaluasi kegiatan, sehingga permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera diselesaikan.
6. Evaluasi program/kegiatan pengembangan hortikultura akan dilakukan setiap triwulan dalam internal Direktorat Jenderal Hortikultura.
7. Hasil pemantauan dan evaluasi satker akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam rapat pimpinan untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya.

Rencana aksi perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dilihat pada Lampiran 8. Pada matrik tersebut berisi upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Tahun 2019 dan permasalahan yang dihadapi terutama untuk kinerja yang tidak tercapai 100% beserta tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun mendatang.

3.2.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Lampiran Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i (diukur dengan menghitung rata – rata ukur secara geometrik)

Persentase capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 dalam hal efisiensi sebesar 4,74%. Efisiensi ini dihitung dan dilihat pada aplikasi SMART DJA, efisiensi ini tidak memiliki skala 0% - 100%. Untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi

sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0 – 100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus :

$$NE = 50\% + \{(E/20) \times 50\}$$

dimana :

NE = Nilai efisiensi

E = Efisiensi

Untuk Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2019 nilai efisiensi nya adalah:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \{(4,74\%/20) \times 50\} \\ &= 0,5 + \{0,0024 \times 50\} \\ &= 0,5 + 0,12 \\ &= 0,62 \text{ atau } 62\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 adalah 62 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 ini merupakan perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam melaksanakan pembangunan di sub sektor Hortikultura pada Tahun 2019. Upaya keras telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target kinerja hortikultura.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 dari 8 (delapan) indikator kinerja yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 5 (lima) indikator kinerja yaitu produksi cabai, produksi bawang merah, rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura), rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura serta nilai kinerja. Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori berhasil yaitu penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura, 1 (satu) indikator kurang berhasil yaitu pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura serta 1 (satu) indikator yang belum dapat dinilai yaitu nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Secara umum keberhasilan pencapaian produksi hortikultura disebabkan oleh adanya dukungan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura, yaitu; (1) pengaturan pola tanam berbasis kebutuhan riil, (2) penguatan kawasan penyangga Jabodetabek dan pengembangan sentra baru di luar Jawa,(3) inisiasi pembentukan korporasi, (5) mendorong penggunaan benih

bermutu, dan (6) pemberian bimbingan teknologi (secara intensif dalam budidaya terutama dalam pengendalian OPT), penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Anomali iklim sangat mempengaruhi produksi komoditas hortikultura, oleh karena itu perlu dilakukan upaya dalam hal penyediaan sarana pertanian untuk mendukung produksi seperti pembuatan embung atau menyediakan teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim (kelebihan hujan dan kekeringan).

Peningkatan volume ekspor produk hortikultura dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan (1) fasilitasi registrasi kebun/lahan usaha, sertifikasi GAP, pertanian organik dan registrasi *packing house*, (2) fasilitasi pengembangan akses pemasaran/investasi produk hortikultura di pasar luar negeri dan melakukan promosi di dalam dan luar negeri, (3) melakukan *business matchmaking* untuk mempertemukan eksportir dan pelaku usaha (kelompok tani), (4) mendorong ekspor 3 (tiga) kali lipat untuk komoditas hortikultura potensi ekspor seperti kunyit, jahe, kapulaga, wortel, kubis, kentang, manggis, mangga, pisang, durian, nenas, salak, krisan dan dracaena, serta (5) mengarahkan petani untuk menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan usaha yang berorientasi ekspor.

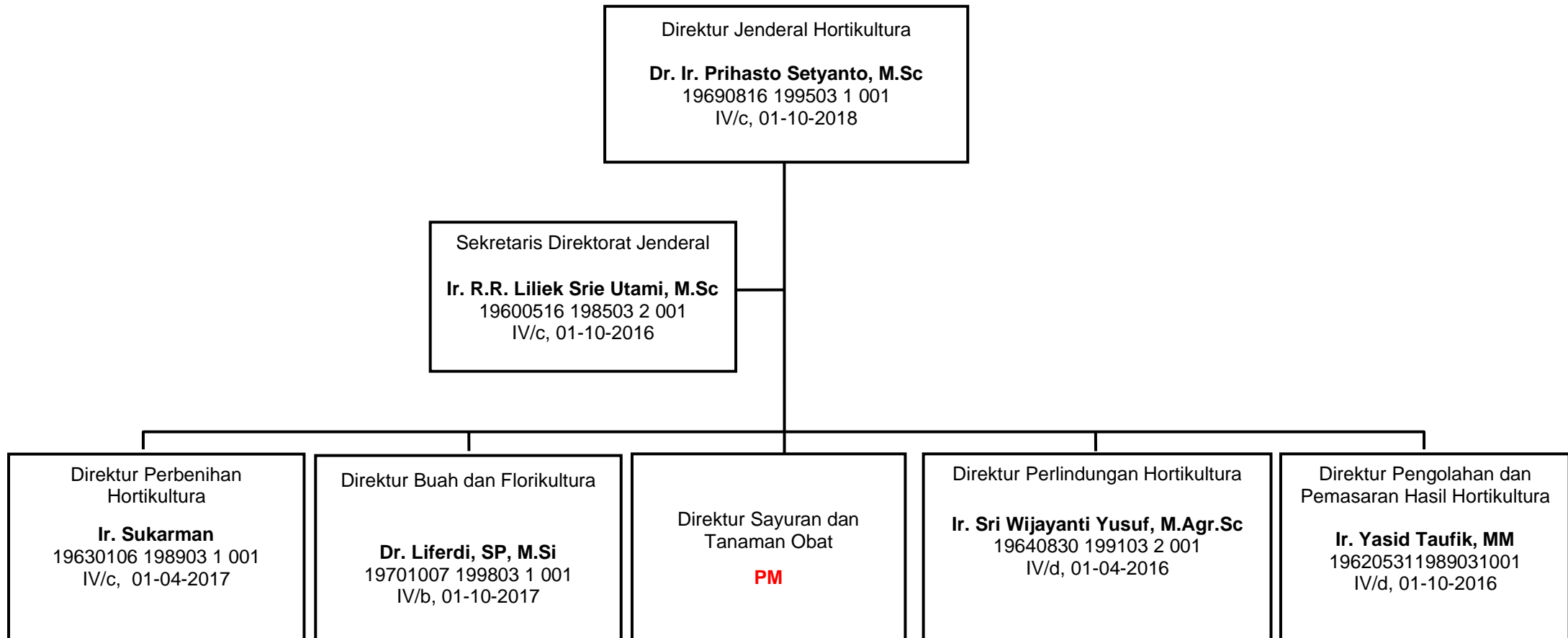
Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah direncanakan. Tidak lupa keberhasilan pembangunan hortikultura banyak ditentukan pula oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di pusat maupun daerah diluar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani. Oleh

karena itu kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.

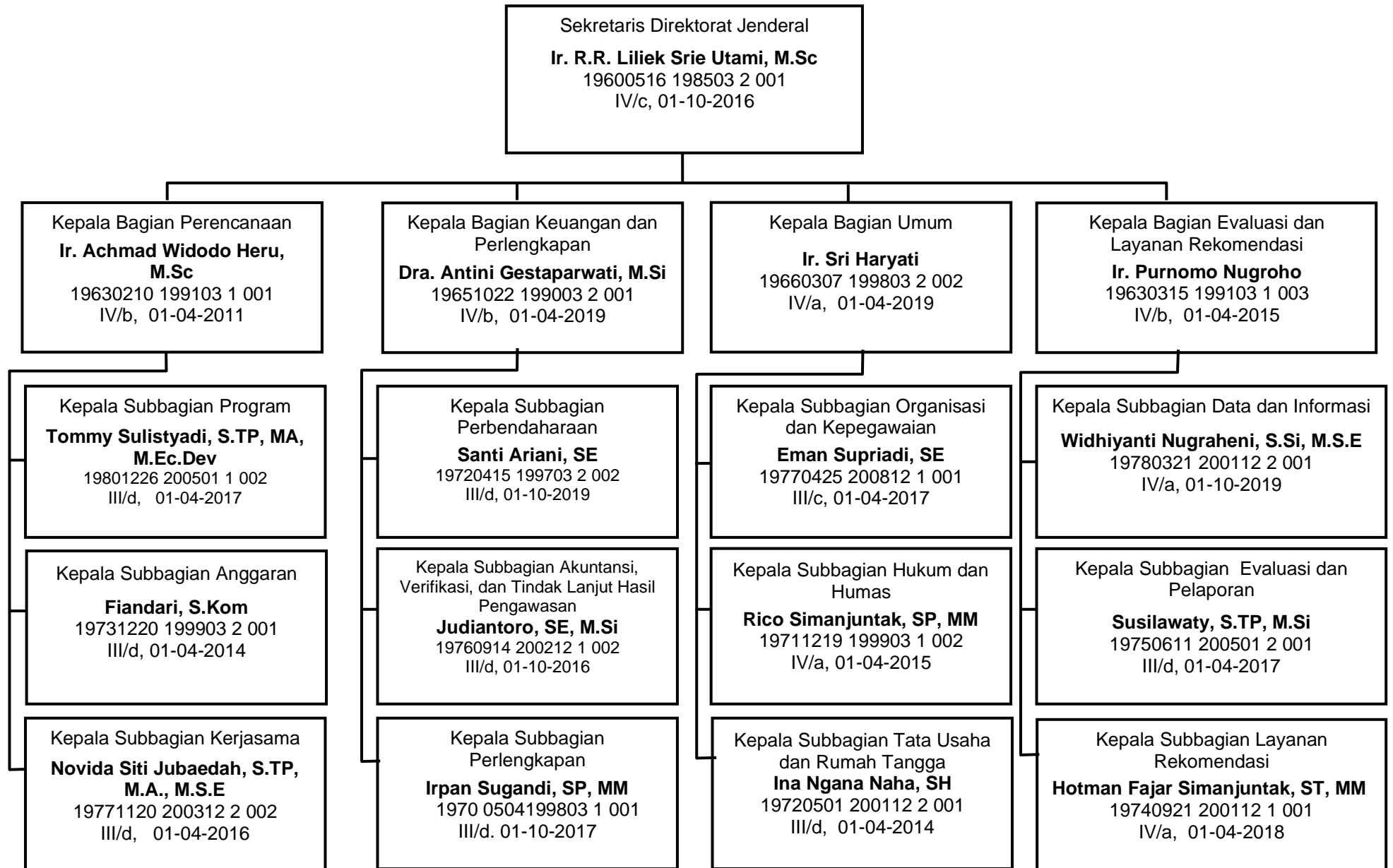
LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Hortikultura

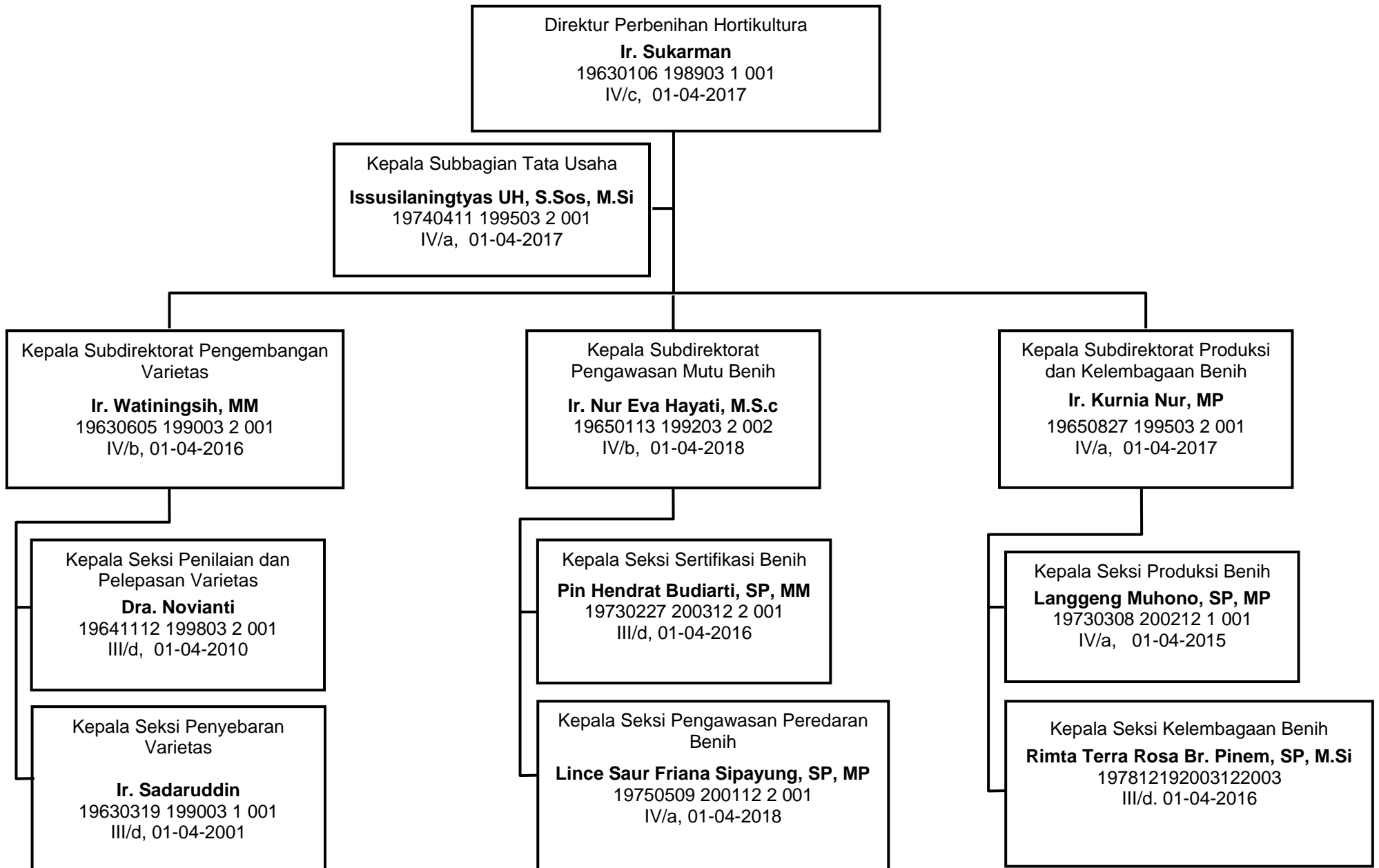
**PEJABAT STRUKTURAL
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**



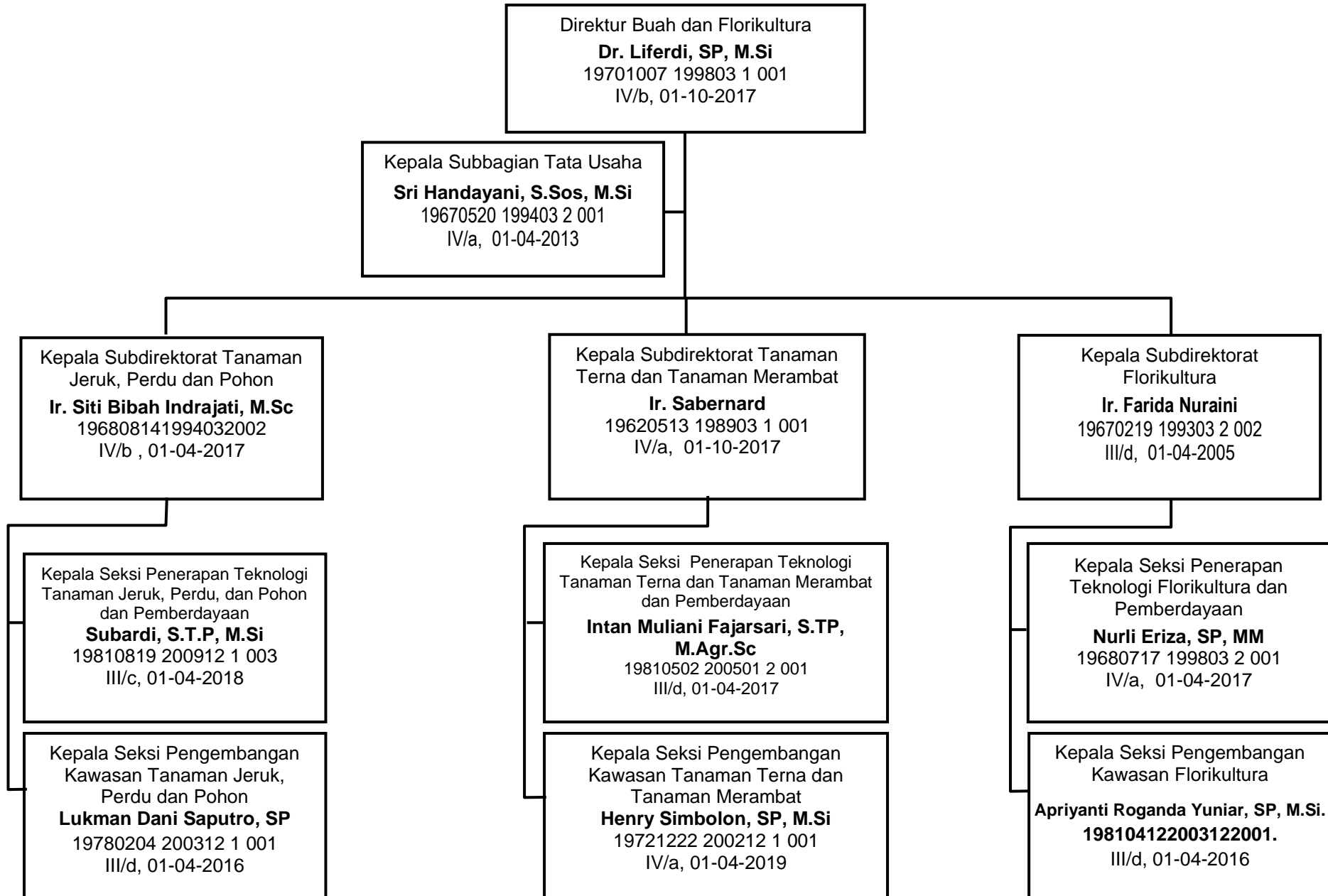
**PEJABAT STRUKTURAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**



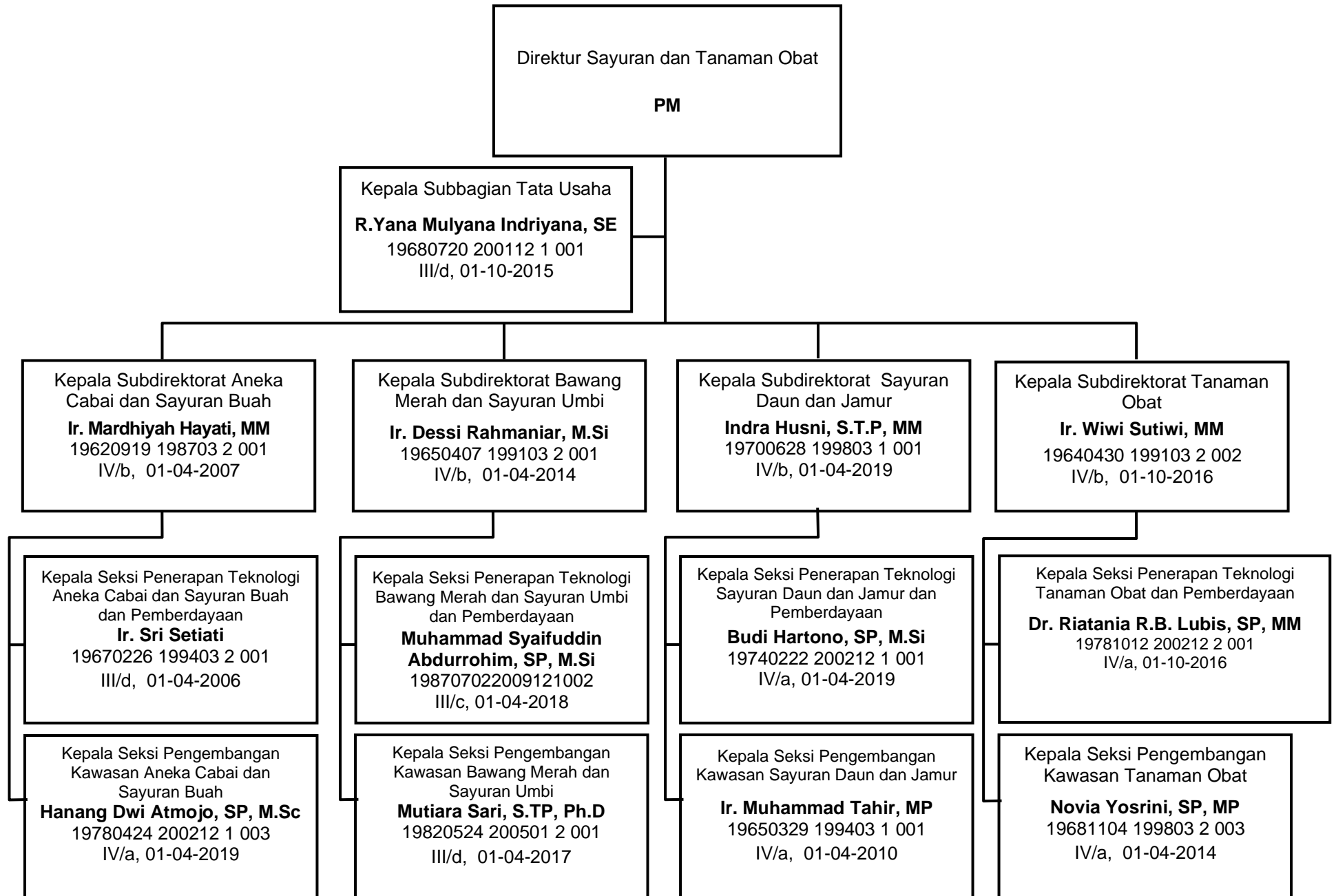
PEJABAT STRUKTURAL DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA



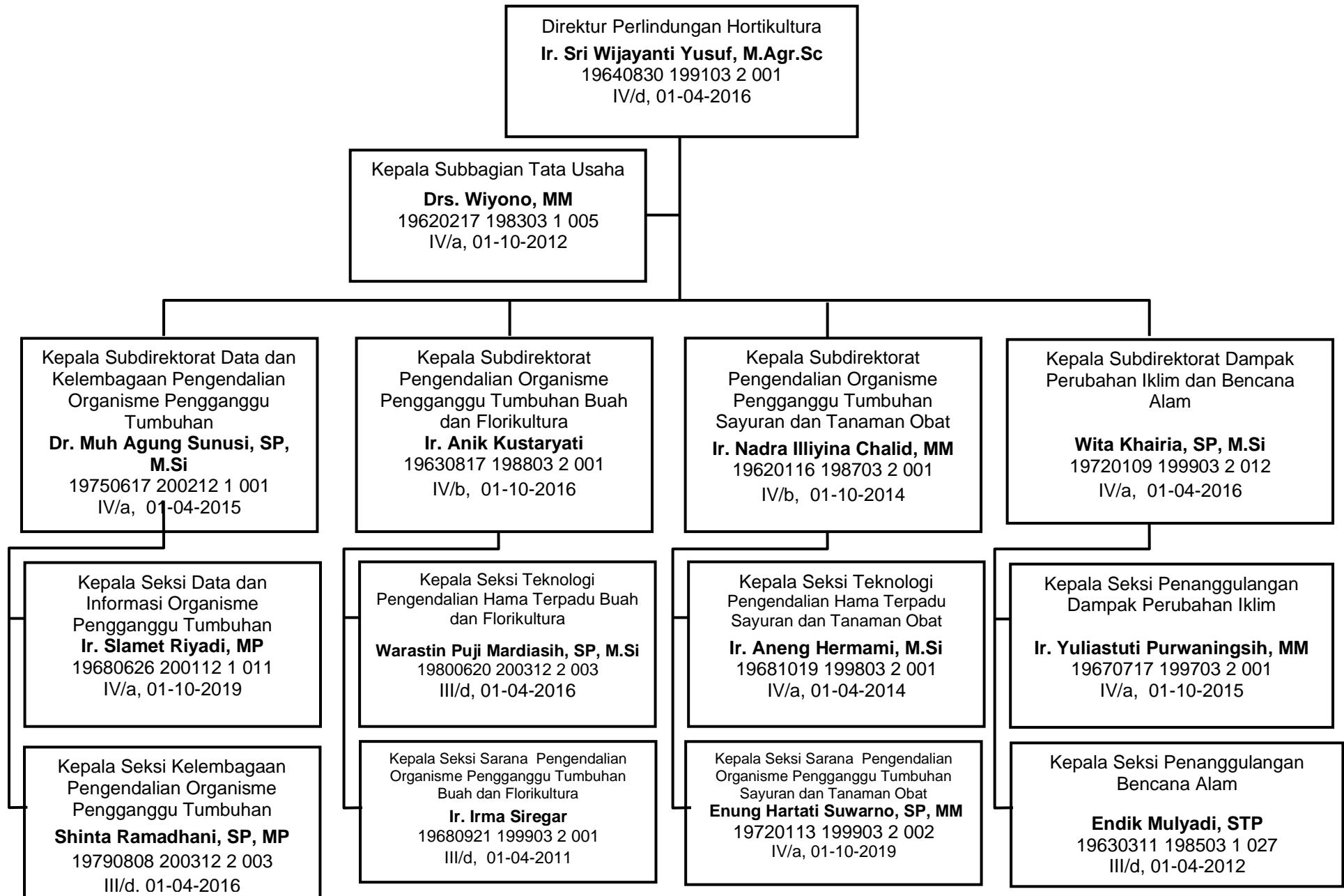
PEJABAT STRUKTURAL DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA



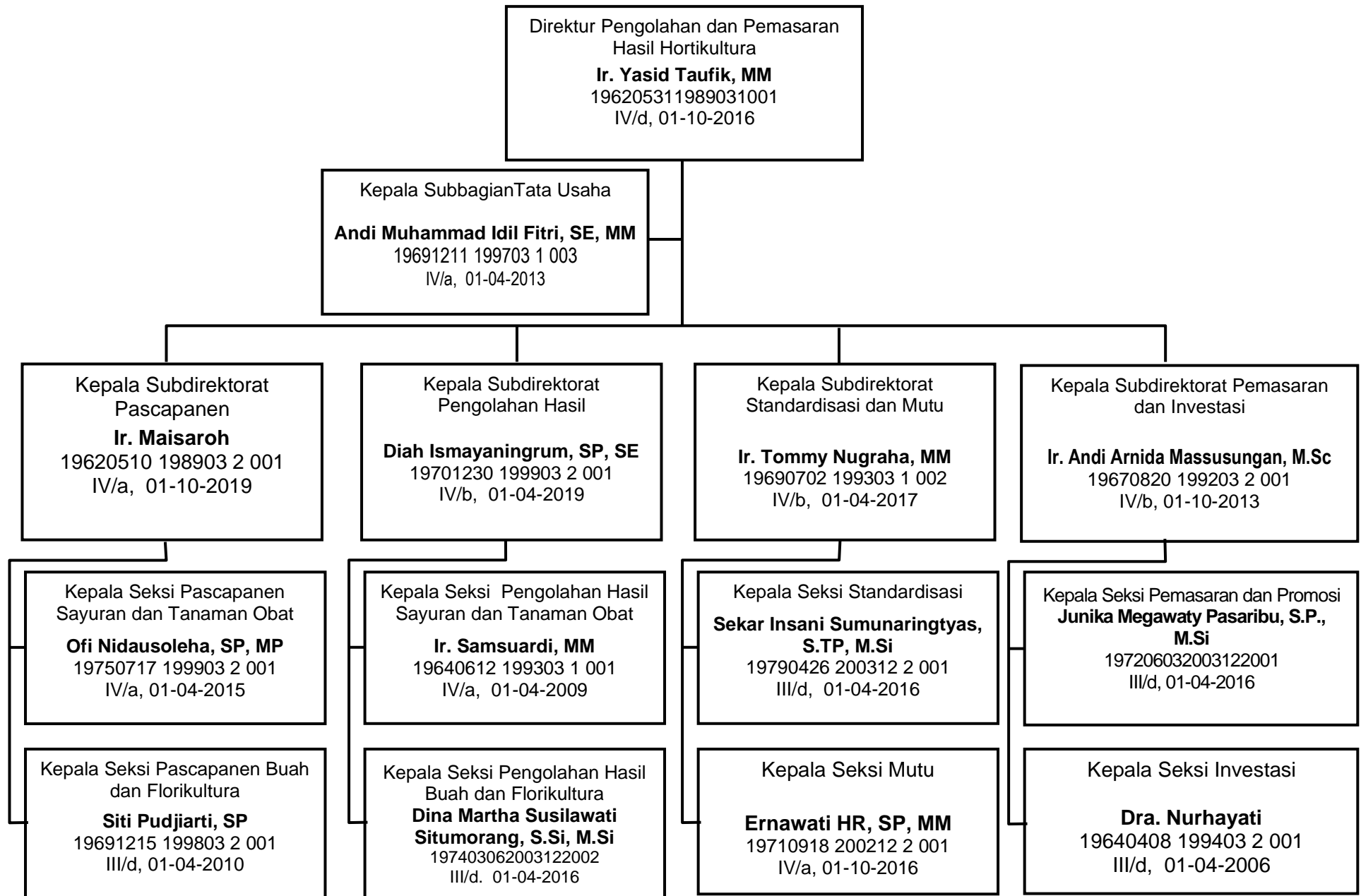
**PEJABAT STRUKTURAL
DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT**



PEJABAT STRUKTURAL DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA



PEJABAT STRUKTURAL
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA



Lampiran 2. Komposisi Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura 2019 Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

KOMPOSISI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2019

NO	GOL/RUANG	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	IV/e												0
2	IV/d		2										2
3	IV/c	2	1	1									4
4	IV/b	2	12	3									17
5	IV/a	1	28	5									34
6	III/d	2	25	42									69
7	III/c		25	54									79
8	III/b		2	23			3			26			54
9	III/a			33			2			16			51
10	II/d						1			15	4		20
11	II/c									10	2		12
12	II/b									2		2	4
13	II/a									1		4	5
14	I/d												0
15	I/c												0
16	I/b												0
17	I/a												0
JUMLAH		7	95	161	0	0	6	0	0	70	6	6	351

Lampiran 3. Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 – 2019

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2018 – 2019

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Target	
				2018	2019
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura (%)	2,83	3,29
		2	Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura (%)	7,38	10.65
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3	Produksi Cabai (Ton)	2.245.440	2.295.481
		4	Produksi bawang merah (Ton)	1.608.766	1.639.724
SP3	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura) (%)	90	90
SP4	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura(%)	5	5
SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	82,50	83,00
		8	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)	73,75	74,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**DIREKTORAT JENDERAL
HORTIKULTURA
TAHUN 2019**



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam pencapaian sasaran pembangunan hortikultura adalah dengan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan terkait yang perlu dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 memfokuskan pada rencana kegiatan strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana kegiatan berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Dengan disusunnya RKT 2019 ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Suwandi, M.Si

NIP. 19670323 199203 1003

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan hortikultura Indonesia tahun 2015-2019 difokuskan pada penyelesaian masalah strategis, diantaranya: 1) Pengendalian inflasi dan substitusi impor; 2) Pembangunan hortikultura ramah lingkungan yang mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam untuk meningkatkan daya saing; 3) Mengantisipasi perubahan gaya hidup ; 4) Penguasaan pangsa pasar domestik dan ekspor dengan meningkatkan akselerasi penguatan kawasan-kawasan hortikultura dan memperkuat jejaring antar pelaku usaha hortikultura; 5) Pemanfaatan hasil kreatifitas, inovatif dan kearifan lokal dalam mengoptimalkan sistem budidaya hortikultura ramah lingkungan, dan penerapan teknologi pascapanen; 6) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hortikultura nusantara berbasis kawasan dengan fokus komoditas dan kegiatan dan dilakukan secara berkelanjutan; dan 7) meningkatkan citra apresiasi dan cinta akan hortikultura Indonesia serta perubahan pola pikir masyarakat Indonesia untuk mencintai produk hortikultura nusantara.

Kebijakan utama Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2019 diarahkan kepada: 1) pengembangan kawasan komoditas prioritas, yaitu aneka cabai dan bawang merah untuk menjaga pasokan aman dan mencukupi kebutuhan konsumsi terutama dalam negeri, 2) upaya swasembada bawang putih, 3) pengembangan jeruk, pisang, mangga, manggis, dan buah lainnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor serta substitusi impor, 4) peningkatan daya saing dan nilai tambah hortikultura, penyederhanaan rantai pasok melalui pasar lelang serta membangun kawasan, skala ekonomi dan pengembangan hilirisasi produk hortikultura.

Komoditas cabai dan bawang merah telah secara nyata berkontribusi pada terjadinya inflasi nasional. Komoditas tersebut menjadi komoditas strategis yang mendapat perhatian bagi pemerintah dalam usahanya melakukan stabilisasi harga melalui stabilisasi produksi dan perbaikan mutu produk. Perhatian terhadap cabai dan bawang merah tetap dipertahankan dengan mendorong stabilitas pasokan di luar Pulau Jawa dan mendorong hilirisasi komoditas tersebut khususnya di Pulau Jawa dan nasional pada umumnya.

Pengembangan sub sektor hortikultura juga diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan nasional dan komoditas spesifik lokasi agar meningkatkan skala usaha pengembangan hortikultura seperti jeruk, mangga, manggis, nenas, salak dan buah lainnya serta tanaman florikultura. Selain itu, jumlah buah impor yang berdatangan ke pasar lokal seperti jeruk membuat menurunnya pendapatan petani lokal. Pembangunan hortikultura bertujuan untuk mendorong tumbuh kembangnya agribisnis hortikultura yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, ramah bagi lingkungan, mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, memperkuat

perekonomian wilayah untuk mendukung pertumbuhan pendapatan nasional. Pengembangan komoditas buah diprioritaskan untuk dialokasikan pada daerah perbatasan karena wilayah perbatasan memiliki peran strategis dari sisi geopolitik nasional. Nilai ekonomi di wilayah perbatasan memiliki potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional meskipun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Kompleksitas kebijakan operasional pelaksanaan kegiatan dituntut menjadi lebih profesional searah dengan visi dan misi kementerian/lembaga. Kebijakan penganggaran diarahkan pada penganggaran dengan pendekatan program. Konsekuensi dari penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan penganggaran dengan pendekatan program tersebut dilakukan penyempurnaan secara bertahap, diantaranya melalui kebijakan penggunaan belanja bantuan pemerintah dan kejelasan bahasa penganggaran. Penerapan sistem penganggaran terpadu diarahkan pada pencapaian sasaran strategis yang terkait langsung dengan Direktorat Jenderal Hortikultura.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 adalah memberi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga capaian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian tahun 2019 adalah tersusunnya RKT Ditjen Hortikultura sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Ditjen Hortikultura dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hortikultura.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura.
- 2) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Renstra Kementerian Pertanian Revisi 2015-2019.
- 6) Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Revisi 2015-2019.
- 7) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Hortikultura.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2.1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Pertanian adalah :

"Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"

Visi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah:

"Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Hortikultura"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi Direktorat Jenderal Hortikultura adalah :

- 1) Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
- 2) Meningkatkan Nilai tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

2.2. Tujuan dan Target

Selaras dengan hal tersebut maka Tujuan Pembangunan Hortikultura adalah **"Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura"** dengan indikator dan target tujuan sebagai berikut ;

TUJUAN	Indikator tujuan	Target 2019
Meningkatnya kesejahteraan petani hortikultura	PDB hortikultura per jumlah tenaga kerja hortikultura	Rp. 36 juta

Sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi :

- 1) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura
- 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura
- 3) Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan
- 4) Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura
- 5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

2.3. Arah Kebijakan

Kebijakan yang akan dilakukan dalam mencapai visi dan misi pembangunan hortikultura 2015-2019 fokus pada usaha pengembangan kawasan, pengembangan sistem perbenihan, pengembangan sistem pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk hortikultura, pengembangan sistem

perlindungan, serta tata kelola manajemen. Adapun penjelasan mengenai arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1). Pengembangan Kawasan Budidaya Hortikultura

- a) Peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing produk hortikultura secara berkelanjutan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi serta registrasi kebun/lahan usaha.
- b) Pemberdayaan kelembagaan petani/pelaku usaha menuju kemandirian usaha hortikultura.
- c) Peningkatan ketersediaan produk melalui pengaturan pola produksi dan penanganan pasca panen.

2). Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

- a) Penumbuhan dan pemantapan industri perbenihan hortikultura
- b) Fasilitasi regulasi perbenihan secara kondusif untuk kemandirian benih dalam negeri
- c) Fasilitasi sarana prasarana perbenihan untuk menghasilkan benih bermutu
- d) Pemasyarakatan dan promosi penggunaan benih bermutu

3). Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

- a) Perlindungan Tanaman Berbasis Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
- b) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (BTPPH, Laboratorium PHP/Agens Hayati/Lab. Pestisida, Klinik PHT dan PPAH)
- c) Peningkatan Pengendalian OPT Hortikultura Penanganan Dampak Perubahan Iklim.

4). Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura

- a) Fasilitasi Gudang/Bangsas pascapanen
- b) Fasilitasi Sarana Prasarana Pascapanen
- c) Fasilitasi Sarana Prasarana Pengolahan
- d) Jumlah Cold Storage Hortikultura
- e) Fasilitasi Pemasaran Hortikultura
- f) Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura

5). Tata Kelola Manajemen

- a) Pengelolaan anggaran berbasis kinerja
- b) Peningkatan pengendalian internal
- c) Peningkatan pengelolaan data dan informasi
- d) Peningkatan pengelolaan aset
- e) Peningkatan aspek kehumasan
- f) Pengelolaan regulasi hortikultura
- g) Pengelolaan Sumberdaya manusia hortikultura

III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Program Pembangunan Hortikultura

Permentan No 43 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.

Dengan demikian Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai program yaitu:

"Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura"

3.2. Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan cerminan dari tugas unit Eselon II yang ada di Direktorat Jenderal. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan output kegiatan meliputi: kawasan jeruk, kawasan buah lainnya, kawasan florikultura, fasilitasi teknis dukungan produksi Buah dan Florikultura, Kawasan Buah di wilayah perbatasan, kawasan mangga, kawasan manggis, kawasan pisang, GAP Buah dan Florikultura, Registrasi Kebun Buah dan Registrasi Lahan Usaha Florikultura.
2. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan output kegiatan meliputi: kawasan aneka cabai, kawasan bawang merah, kawasan sayuran lainnya, kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan, fasilitasi teknis dukungan produksi sayuran dan tanaman obat, serta GAP sayuran dan tanaman obat.
3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan output kegiatan meliputi: Pengembangan Mutu dan Standarisasi, Fasilitas pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah, GHP Hortikultura, Pemasaran dan Produk Hortikultura, Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Fasilitas pascapanen dan pengolahan Hortikultura Lainnya.
4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura dengan output kegiatan meliputi: produksi benih bawang merah, benih buah lainnya, benih jeruk, benih sayuran lainnya, benih cabai, sarana prasarana benih hortikultura, sertifikasi benih hortikultura dan Fasilitas Teknis Dukungan Perbenihan Hortikultura.
5. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan dengan output kegiatan meliputi: gerakan pengendalian OPT Cabai dan Bawang merah, Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya, Penerapan PHT (PPHT), Desa Pertanian Organik, Fasilitas teknis dukungan perlindungan hortikultura dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim.
6. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura dengan output kegiatan meliputi: 1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, 2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; dan 3) layanan perkantoran, terdiri dari administrasi mendukung pelaksanaan kegiatan, pembayaran gaji dan tunjangan serta pemeliharaan kantor.

3.3. Rambu-rambu Kegiatan

Adapun langkah operasional yang akan dilakukan untuk mempertajam pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Hortikultura dapat diurai sebagai berikut:

1. Langkah Operasional Pengembangan Kawasan
 - Peningkatan produksi hortikultura secara berkelanjutan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi
 - Pengembangan lahan baru untuk pengembangan kawasan cabe, bawang merah, dan sayuran lain (bawang putih)
 - Pengembangan kawasan hortikultura untuk di daerah perbatasan
 - Perbaikan produksi pola tanam cabe dan bawang merah
 - Perbaikan infrastruktur kebun/lahan
 - Penerapan GAP
 - Registrasi Lahan Usaha
 - Penerapan teknologi tepat guna (inovatif)
 - Penyediaan teknologi cabai dan bawang merah
 2. Langkah Operasional Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Hortikultura
 - Fasilitasi sistem distribusi penyimpanan dan rantai dingin
 - Penyediaan dan pembinaan bangsal pascapanen
 - Penyediaan sarana prasarana pascapanen
 - Fasilitasi penerapan jaminan mutu
 - Fasilitasi sarana prasarana pengolahan
 - Fasilitasi pemasaran hortikultura
 3. Langkah Operasional Pengembangan Sistem dan Industri Perbenihan Hortikultura
 - Penyediaan benih sumber dalam bentuk biji *True Shallot Seed* (TSS) dan umbi khusus untuk bawang merah.
 - Perbaikan infrastruktur perbenihan pada penangkar.
 - Sertifikasi benih bermutu
 4. Langkah Operasional Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman
 - Gerakan pengendalian OPT secara ramah lingkungan
 - Fasilitasi model penerapan pengendalian OPT yang ramah lingkungan
 - Pengamatan lapang terhadap serangan OPT dan DPI
 5. Langkah Operasional Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Usaha Hortikultura
 - Penguatan peran kapasitas lembaga pengelola
 - Penguatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola
 - Penerapan manajemen pembangunan berbasis *Clean and Good Governance*
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik
-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 penjabaran rencana kinerja dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura Revisi Tahun 2015-2019. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Disamping itu, kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan program kegiatan hortikultura melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Hortikultura

Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Program		Indikator Kinerja Strategis		Satuan	Target
SP01	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	%	3,29
		2	Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	%	10,65
SP02	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	3	Produksi cabai	Ton	2.295.481
		4	Produksi bawang merah	Ton	1.639.724
SP03	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	5	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)	%	90
SP04	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	6	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	%	5
SP05	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	7	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Nilai	83,00
		8	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	Nilai	74,00

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suwandi
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

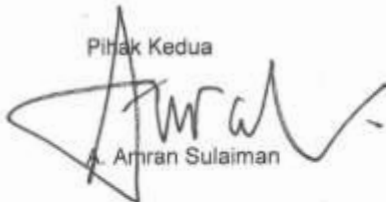
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2019

Pihak Kedua


A. Amran Sulaiman

Pihak Pertama


Suwandi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DITJEN HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1-1 Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	3.29 %
		1-2 Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	-10.65 %
2	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	2-1 Produksi cabai	2,295,481.00 Ton
		2-2 Produksi bawang merah	1,495,993.00 Ton
3	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	3-1 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)	90.00 %
4	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	4-1 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5.00 %
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	5-1 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83.00 %
		5-2 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	74.00 %

KEGIATAN

- 1 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

ANGGARAN

Rp. 1,040,378,419,000

Jakarta, 04 Januari 2019

Menteri Pertanian



A. Amran Sulaiman

Direktur Jenderal Hortikultura



Suwandi

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Revisi I)



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdihorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

A. Amran Sulaiman

Jakarta, 1 Agustus 2019

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DITJEN HORTIKULTURA**

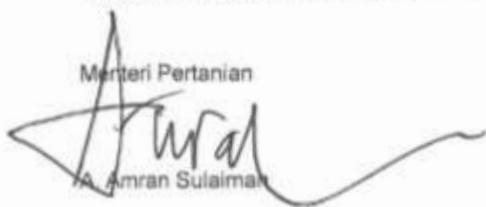
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	3.29 %
		2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	-10.65 %
2	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	1. Produksi cabai	2,295,481 Ton
		2. Produksi bawang merah	1,495,993 Ton
3	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	1. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)	90.00 %
4	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	1. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5.00 %
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	1. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83.00 %
		2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	74.00 %

KEGIATAN

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Rp. 1,040,378,419,000

Jakarta, 01 Agustus 2019

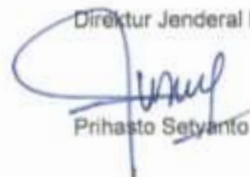
Menteri Pertanian



A. Amran Sulaiman

ANGGARAN

Direktur Jenderal Hortikultura



Prihasto Setyanto

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (Revisi II)



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7806880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdithorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Oktober 2019

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Prihasto Setyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DITJEN HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura	1. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura	3.29 %
		2. Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	-10.85 %
2	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura	1. Produksi cabai	2,295,481 Ton
		2. Produksi bawang merah	1,495,993 Ton
3	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	1. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)	90.00 %
4	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura	1. Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura	5.00 %
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura	1. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83.00 %
		2. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	74.00 %

KEGIATAN

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Rp. 1,040,063,787,000

Jakarta, 25 Oktober 2019


Menteri Pertanian



Syahrul Yasin Limpo

ANGGARAN

Direktur Jenderal Hortikultura



Prihasto Setyanto

Lampiran 8. Rencana Aksi Direktorat Jenderal Hortikultura

**MATRIKS RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

No	Permasalahan/Upaya yang telah dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
1	<p>Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura</p> <p>Penurunan volume ekspor 9 (sembilan) komoditas Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 diikuti oleh penurunan produksi di dalam negeri untuk komoditas kentang, manggis, pisang nenas, dan jahe</p> <ul style="list-style-type: none"> - kentang mengalami penurunan produksi khususnya untuk varietas Granola. Karena krisis air akibat kemarau panjang di Tahun 2019, telah terjadi alih fungsi lahan kentang menjadi lahan bawang putih, terjadi pemutusan penyaluran pupuk serta terjadi penurunan produksi dikarenakan harga jatuh sehingga menurunkan minat petani untuk menanam kentang - komoditas manggis, pisang dan nenas karena anomali musim yang terjadi pada Tahun 2019, dimana musim kemarau panjang terjadi hingga awal Desember 2019. Hal ini berdampak pada mundurnya penanaman buah di akhir tahun (sekitar akhir bulan November - Desember 2019) - jahe tahun disebabkan adanya penurunan luas tanam jahe, karena pada tahun 2015 - 2016 harga jahe jatuh, sehingga petani kurang bergairah menanam jahe. Selama 2 (dua) tahun 2017 dan 2018 tidak ada alokasi pengembangan jahe dan dukungan kegiatan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana pertanian untuk mendukung produksi seperti pembuatan embung yang digunakan untuk menampung air hujan untuk mengairi pertanaman pada saat musim kemarau dan sarana irigasi untuk menjamin kebutuhan air terutama pada musim kemarau. 2. Mengarahkan petani untuk menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan usaha yang berorientasi ekspor 3. Fasilitasi registrasi kebun/lahan usaha, sertifikasi GAP, Organik dan registrasi <i>packing house</i> 4. Fasilitasi pengembangan akses pemasaran/ investasi produk hortikultura di pasar luar negeri dan melakukan promosi di dalam dan luar negeri 5. melakukan <i>business matchmaking</i> untuk mempertemukan eksportir dan pelaku usaha (kelompok tani) 6. Mendorong ekspor 3 (tiga) kali lipat untuk komoditas hortikultura potensi ekspor seperti kunyit, jahe, kapulaga, wortel, kubis, kentang, manggis, mangga, pisang, durian, nenas, salak, krisan dan dracaena.

No	Permasalahan/Upaya yang telah dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
2	Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura	
	Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan impor komoditas substitusi impor adalah :	
	1. Peningkatan luas tanam, produksi dan produktivitas jeruk melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta penerapan GAP Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan luas tanam, produksi dan produktivitas serta penerapan GAP 2. Penyediaan sarana pertanian untuk mendukung produksi seperti pembuatan embung yang digunakan untuk menampung air hujan untuk mengairi pertanaman pada saat musim kemarau dan sarana irigasi untuk menjamin kebutuhan air terutama pada musim kemarau 3. Menyediakan teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim (kelebihan hujan dan kekeringan).
	2. Pemberian bimbingan teknologi (secara intensif dalam budidaya jeruk dan bawang putih terutama dalam pengendalian OPT), pendampingan dan pengawalan kepada petani/pelaku usaha.	Pemberian bimbingan teknologi (secara intensif dalam budidaya terutama dalam pengendalian OPT), penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun di daerah.
	3. Penyediaan benih jeruk dan bawang putih bermutu	Penyediaan benih bermutu terutama yang spesifik lokasi pengembangan.
	4. Mendorong peningkatan luas tanam dan produksi bawang putih dengan menumbuhkan sentra-sentra baru di luar pulau Jawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas bawang putih. Kualitas benih yang berukuran besar dan bermutu baik menjadi faktor utama keberhasilan pertanaman. Indikatornya antara lain ukuran umbi yang dihasilkan cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan nasional 2. Penggunaan <i>cold storage</i> untuk mempercepat masa dormansi benih bawang putih (teknologi vernalisasi) serta penggunaan <i>instore dryer</i> untuk mempercepat pengeringan.

No	Permasalahan/Upaya yang telah dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	5. Membuat <i>Roadmap</i> menuju swasembada bawang putih dengan melibatkan partisipasi dari pelaku usaha impor melalui ketentuan yang tertuang di dalam Permentan Nomor 38 Tahun 2018 tentang RIPH.	Menerapkan kebijakan wajib tanam dan produksi bawang putih bagi pemegang RIPH, diiringi pelaksanaan di lapangan dengan melibatkan dinas pertanian setempat
3	<p>Produksi cabai</p> <p>Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2019 melalui pengaturan pola tanam berbasis kebutuhan riil, budidaya ramah lingkungan, penguatan kawasan penyangga Jabodetabek dan pengembangan sentra baru di luar Jawa serta inisiasi pembentukan korporasi.</p>	Untuk mempertahankan peningkatan produksi aneka cabai adalah dengan menyusun pola tanam 2020 baik berdasarkan data ATAP dan kebutuhan riil, konsistensi daerah untuk melaksanakan manajemen pola tanam, mendorong percepatan proses pengadaan bantuan dari APBN, mendorong penerapan sistem budidaya ramah lingkungan serta komunikasi yang efektif antara pusat, daerah dan <i>Champion</i> .
4	<p>Produksi Bawang Merah</p> <p>Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi bawang merah Tahun 2019 adalah mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong penggunaan benih biji (TSS) dan menerapkan budidaya ramah lingkungan. Alokasi APBN difokuskan untuk pengembangan di luar sentra eksisting dan pulau Jawa. Saat ini, pengembangan bawang merah telah menyebar di wilayah <i>shortage</i> bawang merah dan muncul sentra-sentra baru seperti di Kabupaten Tapin, Belu, Bengkayang dan sebagainya. Selain itu adanya kebijakan tidak membuka keran impor bawang merah semakin memacu produksi di dalam negeri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendorong penggunaan TSS (<i>true shallot seeds</i>) untuk meningkatkan produksi dan provitas bawang merah 2. mengurangi loses pada saat panen dan pascapanen (penurunan 2 % per tahun) dengan penggunaan teknologi <i>instore dryer</i> untuk mempercepat pengeringan dan mengurangi susut

No	Permasalahan/Upaya yang telah dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
5	<p>Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pascapanen hortikultura)</p> <p>Kebijakan mendorong penanganan pascapanen diarahkan pada pembinaan dan bimbingan teknis serta dukungan fasilitasi bangsal pascapanen atau gudang pengering dan peralatan pascapanen lainnya pada pengembangan kawasan, komoditas utama terutama cabai dan bawang dan jeruk serta komoditas yang potensi dan berorientasi ekspor maupun komoditas yang masif. Langkah operasional yang telah dilakukan antara lain fasilitasi peralatan pascapanen, pengadaan bangsal pascapanen, dan bimbingan teknis pascapanen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan bimbingan teknis penanganan pascapanen hortikultura secara tepat sasaran melalui bimbingan teknologi/ sekolah lapang GHP hortikultura serta pembinaan dan pengawalan kegiatan pascapanen 2. menyusun buku pedoman pascapanen hortikultura 3. memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana pascapanen berupa bangunan bangsal pascapanen dan atau alat pascapanen di kawasan sentra produksi hortikultura untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing. 4. Melakukan pendampingan untuk pemenuhan persyaratan registrasi bangsal pascapanen
6	<p>Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura</p> <p>Keberhasilan pengamanan produksi hortikultura ini antara lain disebabkan oleh peningkatan pengelolaan OPT hortikultura, koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaku perlindungan, serta peningkatan sosialisasi/ penyebar luasan informasi terkait pengelolaan OPT hortikultura.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan bimbingan teknis teknologi pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan sesuai dengan sistem PHT. 2. Melaksanakan Gerakan Pengendalian OPT cabai dan bawang merah 3. Penguatan kelembagaan sistem perlindungan hortikultura khususnya pada Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/ Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) dan Klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 4. Penerapan PHT (PPHT): Kegiatan PPHT merupakan salah satu metode penyebarluasan teknologi pengendalian OPT yang bersifat lokal dan ramah lingkungan. Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT) diawali melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).

No	Permasalahan/Upaya yang telah dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
		5. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam 6. Peningkatan kompetensi petugas perlindungan tanaman melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan petugas, magang, mengikuti seminar, lokakarya, gelar teknologi dan lain-lain.
7	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Penilaian akan dilakukan pada akhir bulan Maret – April 2020	Penilaian di tahun depan akan dijadwalkan diawal tahun
8	Nilai Kerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011) 1. Tidak tertibnya petugas pelaporan Satker dalam melaporkan capaian keluaran bulanan (realisasi volume keluaran) dan capaian indikator keluaran kegiatan per semester. 2. Masih banyak Satker yang tidak konsisten antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana 3. Beberapa Satker daerah memiliki realisasi serapan anggaran yang rendah atau tidak mencapai target output yang telah ditetapkan karena permasalahan teknis dan administrasi, contohnya tidak tercapainya output kawasan bawang putih seluas 643 Ha. 4. Terdapat beberapa indikator sasaran program yang tidak mencapai target seperti pertumbuhan ekspor yang negatif dan penurunan impor yang tidak mencapai target 5. Masih belum efisiennya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker pusat dan daerah	Melakukan pembinaan dan pendampingan untuk petugas pelaporan daerah dalam melakukan pengisian aplikasi SMART serta melakukan bimbingan teknis/pelatihan petugas pelaporan secara berkala Melakukan sosialisasi penilaian nilai kinerja kegiatan secara kontinu kepada satker – satker mandiri Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala agar menjadi <i>early warning</i> dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga potensi masalah yang akan muncul dapat diatasi.

KEMENTERIAN PERTANIAN | DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

